

**LAPORAN PENELITIAN MADYA**

**PENGAYAAN BAHAN AJAR**



**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan-Kecamatan Di Kota Depok  
(Studi Kasus Kecamatan Tapos)**

**Oleh:**

**Florentina Ratih Wulandari, SIP., M.Si (Ketua)**

**Ratna Nurhayati, SH., M.Hum. (Anggota)**

**Hasmonel. SH., M. Hum (Anggota)**

**Jurusan Ilmu Administrasi/FISIP**

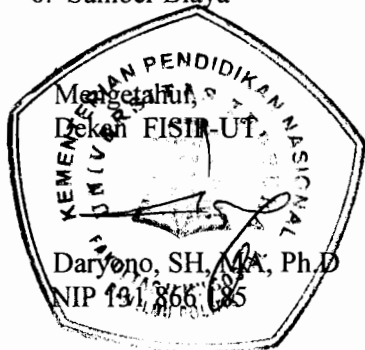
**UNIVERSITAS TERBUKA**

**Tahun 2010**



**Lembar Pengesahan**  
**Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. a. Judul Penelitian : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan di Kota Depok (Studi Kasus Kecamatan Tapos)
- b. Bidang Penelitian : Bahan Ajar (KBA)
- c. Klasifikasi Penelitian : Penelitian Madya
- d. Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi Publik/ Administrasi Negara
2. Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap : Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si  
b. N I P : 19710609 199802 2 001  
c. Gol. Kepangkatan : Penata / III/c  
d. Jabatan Akademik : Lektor  
f. Fakultas : FISIP
3. Anggota Peneliti  
a. Jumlah Anggota : 2 (Dua) Orang  
b. Nama Anggota/Unit Kerja : 1. Ratna Nurhayati, SH., M. Hum  
2. Hasmonel, SH., M. Hum
4. a. Periode Penelitian : 2010  
b. Lama Penelitian : 10 (sepuluh) Bulan
5. Biaya Penelitian : Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
6. Sumber Biaya : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka



Pondok Cabe, 28 Desember 2010  
Ketua Peneliti,

Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si  
NIP 19710609 199802 2 001

Menyetujui,  
Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed. M.Si  
NIP. 19570422 198503 2 0

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Lembar Pengesahan.....	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel.....	5
Abstrak.....	6
Abstract.....	7
Rekomendasi.....	8
Prakata.....	9
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>10</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	10
B. Rumusan Permasalahan.....	14
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Pemekaran Daerah.....	16
B. Proses Pembentukan Daerah Otonom dan Alur Pikir Teknokratik Dalam Pemekaran Daerah.....	17
C. Prinsip Studi Kelayakan Pembentukan Daerah.....	18
D. Dimensi-Dimensi Pemekaran Daerah.....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	20
B. Studi Kasus.....	20
C. Lokasi penelitian.....	21
D. Metode Pengumpulan Data Lapangan.....	21
E. Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.....	22
<b>BAB IV Temuan dan Analisis.....</b>	<b>24</b>
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Tapos Kota Depok.....	24
B. Kendala-Kendala yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Tapos Kota Depok.....	37
<b>Bab V Simpulan dan Saran.....</b>	<b>42</b>
Simpulan.....	42
Saran atau Rekomendasi.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>45</b>
Curriculum Vitae.....	45
Transkrip Wawancara.....	51
Pedoman Wawancara.....	54

Lampiran Tabel.....55

Lampiran Ijin Penelitian dari kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok

Lampiran Realisasi Penerimaan PBB Bulan Nopember

Kecamatan Tapos Kota Depok, 2010

Daftar Tabel

Judul	Halaman
Tabel I. Potensi Calon Kecamatan Cimanggis (Induk) dan Calon Kecamatan Tapos (Pemecahan)	26
Tabel II. Disain Strategi Potensi Pada Kecamatan Tapos	27

### Abstrak

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan-Kecamatan Di Kota Depok (Studi Kasus Kecamatan Tapos)

Peneliti:

Florentina Ratih Wulandari

Ratna Nurhayati

Hasmonel

Adanya UU No. 22 Th. 1999 dan kemudian UU No. 32 Tahun 2004, mewadahi upaya pemekaran wilayah (*catchment area*) sebagai salah satu terobosan politis dan manajemen pemerintahan, untuk mengefektifkan layanan publik dan mentransformasi perubahan konstruktif bagi kepentingan nasional. Hal ini ditindaklanjuti oleh PemKot Depok melalui Perda Kota Depok No. 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, dari 6 kecamatan menjadi 11 kecamatan. Permasalahan penelitian ini adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok, dengan studi kasus Kecamatan Tapos.

Metode penelitiannya adalah metode penelitian kualitatif, dengan studi kasus pada kecamatan Tapos. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi literatur terkait pemekaran daerah dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok yang salah satunya Kecamatan Tapos merupakan strategi untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat lebih efektif, efisien dan berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tapos, antara lain pengembangan wilayah, mendekatkan (distribusi) layanan publik kepada masyarakat, peningkatan kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan wilayah berbasis masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan Tapos. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tapos, terdiri dari faktor lingkungan internal (jumlah penduduk dan luas wilayah) dan eksternal (faktor politik dan birokrasi). Penelitian ini merupakan penelitian untuk kajian bahan ajar dan direkomendasikan untuk buku materi pokok IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota yang akan direvisi pada tahun 2011 and IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah.

Kata kunci: pemekaran wilayah, pemekaran kecamatan, pelaksanaan pemekaran, faktor-faktor lingkungan, faktor internal, faktor eksternal, pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat

## Abstract

### *Factors Which Influences Implementation of Subdistrict Catchment Area of Depok Municipality (Case Study Of Tapos Subdistrict)*

Researchers:

Florentina Ratih Wulandari ([rwulan@ut.ac.id](mailto:rwulan@ut.ac.id), [fratih\\_wulandari@yahoo.co.id](mailto:fratih_wulandari@yahoo.co.id))

Ratna Nurhayati ([anna@ut.ac.id](mailto:anna@ut.ac.id))

Hasmonel ([hasmonel@ut.ac.id](mailto:hasmonel@ut.ac.id))

The existence of Act Number 22 of 1999 followed Act Number 32 of 2004, accomodate the efforts of catchment area as a political strategy and governmental management for public service effectiveness and transformation of constructive change for national interests. Therefore, Depok Municipality legitimates Municipal Regulation Number 08 Year 2007 on Subsdistrict Catchment Area in Depok Municipality, from 6 subdistricts to 11 subdistricts. The research issue is enviromental factors which influences subdistrict catchment area of Depok Municipality: case study of Tapos Subdistrict.

Research method that used in this research is qualitative method, with case study. This research is descriptive, in nature. Qualitative data collection is obtained through in-depth interview, literature study of catchment area and observation.

The research showed that subdistricts catchment area within Depok Municipality, which one of them is Tapos Subdistrict, is as strategy of bringing public service closely to public, more effective, more efficient and more qualified. Factors influence the implementation of subdistrict Tapos catchment area, are region development, bringing public service closer to public, increasing public control of governmental performance and local people participative development and increasing local people welfare (distributive equity of development Tapos Subdistrict). The enviromental factors which influences Tapos subdistrict catchment area consist of internal factors and external factors. The internal factors consist of the number of population and size of area. The external factors consist of political dan bureaucracy factors. This research for learning materials review, be recommended for revision learning material of IP4M4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota in 2011 and IP4M4214 Sistem Pemerintahan Daerah.

**Keywords:** catchment area, catchment of subdistrict area, implementation of catchment area, environmental factors, internal factors, external factors, local people participative development.

### Rekomendasi

1. a. Judul Penelitian	: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan di Kota Depok (Studi Kasus Kecamatan Tapos)
b. Bidang Penelitian	: Bahan Ajar (KBA)
c. Klasifikasi Penelitian	: Penelitian Madya
d. Bidang Ilmu	: Ilmu Administrasi Publik/ Administrasi Negara
2. Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si
b. N I P	: 19710609 199802 2 001
c. Gol. Kepangkatan	: Penata / III/c
d. Jabatan Akademik	: Lektor
f. Fakultas	: FISIP
3. Anggota Peneliti	
a. Jumlah Anggota	: 2 (Dua) Orang
b. Nama Anggota/Unit Kerja	: 1. Ratna Nurhayati, SH., M. Hum 2. Hasmonel, SH., M. Hum
4. Matakuliah	: IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota dan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah.
5. Judul Modul	: Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota; Sistem Pemerintahan Daerah
6. SKS	: 3 sks
7. Kode Modul	: IPEM4542; IPEM4214
8. Rekomendasi	: <b>Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah pengayaan bahkan usulan materi baru tentang pemekaran wilayah (<i>catchment area</i>) untuk revisi buku materi pokok IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota pada tahun 2011 dan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah.</b>



## Prakata

Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan ridhoNya, sehingga kami dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan laporan penelitian kajian bahan ajar (KBA) dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan di Kota Depok (Studi Kasus Kecamatan Tapos)" sesuai tugas kami. Terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada Ketua LPPM Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si, Kepala Pusat Kelimuan LPPM-UT Dra. Endang Nugraheni, M.Ed. M.Si, Dekan dan Para Wakil Dekan FISIP-UT, Kajur Ilmu Administrasi, Sekjur Ilmu Administrasi, Kapro IPEM, pakar Prof. DR Irfan Maksum, semua narasumber baik di Kecamatan Tapos dan Kantor Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Depok serta Subbagian Pemerintahan Umum Kota Depok, dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian kami ini, khususnya teman-teman staf administrasi dan staf akademik di Jurusan Ilmu Administrasi dan LPPM-UT, maupun handai taulan lainnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sekalian.

Semoga hasil penelitian kami ini dapat berguna bagi pengayaan kelimuan dan inspirasi baru bagi matakuliah IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota dan atau IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah, seperti yang direkomendasi dari hasil penelitian ini.

Banyak kekurangan dan kesalahan di sana-sini dalam laporan penelitian kami, oleh sebab itu, kami mohon maaf dan mohon saran yang konstruktif untuk penyempurnaannya. Akhirul kalam, wabillahir taufiq wal hidayah wasswrwb.

Jakarta, Desember 2010

Tim Peneliti

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan yang kemudian dilanjutkan dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004, telah membuka kesempatan subsistem nasional melakukan upaya otonomi daerah dengan tujuan menyejahterakan seluruh komponen daerah dengan semangat demokrasi. Salah satu wujudnya adalah melakukan pemekaran daerah-daerah tertentu yang berpotensi untuk otonom.

Selama ini, pemekaran daerah menjadi salah satu terobosan politis dan manajemen pemerintahan yang dianggap efektif untuk membangun suatu wilayah dan mencegah disintegrasi bangsa. Pemekaran wilayah atau daerah juga merupakan salah satu muatan strategis pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya menyangkut isu penting yakni mendesain pemerintah daerah untuk mentransformasi suatu bangsa, menjadi bangsa yang bermartabat dan kuat dalam lingkungan internal maupun dimata regional bahkan internasional. Pembangunan daerah terdiri dari pembangunan sektoral dan pembangunan spasial. Pembangunan sektoral mencakup bidang sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan serta lainnya. Sedangkan pembangunan spasial mencakup tataruang, lingkungan hidup dan lainnya.

Signifikansi pemekaran daerah tidak lepas pula dari konteks pembangunan suatu wilayah. Pembangunan di bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai daerah dengan cara melakukan pemekaran daerah berfungsi untuk mengarahkan perubahan perilaku aparat pemerintah daerah yang bersangkutan dari kondisi melayani masyarakat lambat menjadi lebih cepat, dari tarif pelayanan yang mahal menjadi lebih murah, dari yang sulit menjadi mudah. Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keamanan dan ketertiban, dan mempercepat pengembangan potensi, yang intinya lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tujuan utama pemekaran adalah pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aspek-aspek yang terkait dalam pemekaran wilayah mencakup aspek sosial ekonomi dan politis. Ditilik dari aspek sosial ekonomi, pemekaran wilayah sebagai bagian dari bentuk perubahan sosial yang direncanakan, mengingat didalam pemekaran wilayah terdapat perubahan

sosial. Hal ini merujuk pada fenomena yang terjadi dalam masyarakat, perubahan sosial ekonomi tersebut dapat berlangsung cepat atau lambat, dalam berbagai bentuk dan mempengaruhi sistem sosial ekonomi, sistem politik dan pemerintahan. Perubahan sosial dapat pula terjadi dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya tuntutan perubahan perilaku birokrat yang konstruktif dalam melayani masyarakat daerah, agar lebih cepat, efektif dan efisien.

Pada kenyataannya, pemekaran wilayah rentan dengan muatan-muatan kepentingan-kepentingan politis dan ekonomi lainnya, yang cenderung berlawanan dengan semangat demokrasi dalam otonomi daerah, khususnya pemekaran wilayah. Masalah-masalah yang kerap muncul dari pemekaran wilayah, antara lain, menyangkut masalah perubahan administrasi kependudukan, batas wilayah, pengeluaran APBN/APBD bertambah, dan ketidakefektifan atau ketidakefisiensian pelayanan publik. Seperti yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah ditegaskan bahwa setiap pemekaran dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pemekaran daerah merupakan perubahan sosial yang direncanakan, artinya pemerintah memiliki konsep perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam setiap langkah. Ketentuan tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. (<http://regional.kompas.com/read/2009/06/18/14153989/2> diunduh Selasa 19 Januari 2010 pkl. 10.27 WIB)

Dari data Kementerian Dalam Negeri RI, sejak tahun 1999, ada 205 pembentukan wilayah baru yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Diperkirakan dalam setiap 15 hari ada satu daerah baru yang dibentuk. Saat ini, sekitar 20 daerah telah diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk proses pemekaran. (<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/02/24/brk.20100224228263.id.html> diunduh Rabu 24 Februari 2010 pkl.15.45). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses administrasi pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) menemukan pemekaran ini tidak didukung dengan suatu *grand design* yang jelas. (<http://regional.kompas.com/read/2009/04/21/13161355/> diunduh Selasa 19 Januari 2010 pkl. 10.47 WIB)

Bahkan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja pemerintahan daerah pada tahun 2008, menunjukkan bahwa dari 148 daerah otonom baru yang dimekarkan dalam kurun waktu tahun 1999 – tahun 2007, ada 49 daerah berkinerja pemerintahan

tinggi dan 28 daerah berkinerja pemerintahan rendah, sisanya 71 daerah tidak dapat dievaluasi sebab tidak ada laporan kinerja pemerintahannya. Lebih parah lagi, hasil evaluasi Kementerian negara Pembangunan Daerah Tertinggal menemukan ada 34 daerah tertinggal atau miskin setelah dimekarkan. (Wahyudi dan Berindra dalam "menata ulang pemekaran daerah" pada <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/01/11>, Kompas 7 Januari 2010, diunduh 10 Oktober 2010 pk.11.37 WIB).

Khusus wilayah Kota Depok untuk pemekaran kecamatan-kecamatan, didukung oleh DPRD Kota Depok, khususnya Komisi A Bidang Pemerintahan. Pemekaran wilayah Kota Depok yang tadinya terdiri enam kecamatan menjadi 11 kecamatan. Sebelumnya, wacana pemekaran kecamatan ini sebenarnya sudah lama disampaikan, yaitu sejak masa pemerintahan Walikota lama Badrul Kamal dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota 821.28/60/KPTS/TAPEM/HK/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pemekaran Kecamatan. (Antara News 11 Maret 2007 "DPRD Dukung pemekaran Depok menjadi 11 Kecamatan, diunduh 16 Februari 2010 pk.09.45 WIB).

Latar belakang sangat diperlukannya upaya pemekaran wilayah kecamatan di Kota Depok antara lain: *pertama*, selama ini pembangunan di beberapa kecamatan saat ini belum merata, terutama pada bagian wilayah kelurahan tertentu yang memiliki jarak relatif jauh dari kantor kecamatan. *Kedua* pelayanan pemerintahan belum menyentuh masyarakat sampai ke pelosok wilayah kerja kecamatan, serta masih banyaknya potensi yang belum tersentuh atau belum dikelola secara optimal sehingga terjadi kesenjangan pelayanan masyarakat dan pembangunan pada bagian-bagian tertentu dalam wilayah kerja kecamatan.

Dampak strategis lainnya dari pemekaran wilayah kecamatan-kecamatan di Kota Depok hasil pemekaran, rentang kendali pemerintah akan menjadi lebih kecil dan institusi pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Eksternalitas positif lainnya dari pemekaran wilayah kecamatan-kecamatan di Kota Depok tersebut juga akan ada peningkatan, pemerataan dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara historis, dari aspek legal yuridis, pemekaran kecamatan-kecamatan tersebut melalui kajian analisis berdasarkan Kepmendagri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, yang menetapkan bahwa pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan memperhatikan kemampuan Kabupaten/Kota. Dalam Kepmendagri tersebut pembentukan sebuah kecamatan harus memenuhi kriteria-kriteria

yaitu jumlah penduduk (minimal 10.000 jiwa), luas wilayah (minimal 7.5 KM<sup>2</sup>) dan jumlah desa/kelurahan (minimal 4 Desa/Kelurahan). (Republika, 14 Juli 2009). Hasil akhirnya adalah dari enam kecamatan yang ada di Kota Depok, lima kecamatan direncanakan akan dimekarkan. Lima kecamatan tersebut adalah kecamatan Sukmajaya, Pancoran Mas, Cimanggis, Sawangan dan Limo. Sementara kecamatan Beji tetap menjadi satu kecamatan. Kecamatan Sukmajaya dalam rancangan hasil kajian akan dibagi menjadi dua dengan nama kecamatan Sukmajaya dan Sukamaju. Selanjutnya, Kecamatan Cimanggis menjadi Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos. Kecamatan Pancoran Mas menjadi Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung. Kecamatan Sawangan menjadi Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari. Kecamatan Limo menjadi Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere. (<http://megapolitan.kompas.com/read/2009/07/14/18150313/>, "Akhir Tahun Ini Depok Punya 11 Kecamatan," diunduh pada hari Senin 1 Februari 2010, pkl. 14.27 WIB)

Pada penelitian ini akan diangkat permasalahan tentang pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok, dengan studi kasus Kecamatan Tapos. Alasan-alasan yang mendasari diangkatnya pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok dengan studi kasus Kecamatan Tapos dalam penelitian ini, antara lain: (1) Kecamatan Tapos salah satu kecamatan hasil pemekaran Kota Depok dan merupakan wilayah yang termasuk *hinterland*-nya DKI Jakarta, dimana lebih dari 60% penduduknya merupakan pekerja atau pengusaha yang lokasi kerja atau usahanya berada di wilayah DKI Jakarta, sehingga akselerasi pertumbuhan kotanya dituntut dapat mengakomodasi kebutuhan warganya dalam berbagai fasilitas publik, sosial, ekonomi dan tempat tinggal. Jumlah penduduk di Kota Depok tahun 2005 mencapai 1.374.522 jiwa, terdiri atas laki-laki 696.329 jiwa (50,66%) dan perempuan 678.193 jiwa (49,34%). Sedangkan luas wilayah hanya 200,29 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Kota Depok adalah 6.863 jiwa/km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk tersebut tergolong "padat", apalagi jika dikaitkan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. (<http://www.depok.go.id/profil-kota/demografi> diunduh pada hari Selasa 2 Februari 2010, pkl. 14.13 WIB). Situasi tersebut menunjukkan kota Depok saat ini, termasuk juga wilayah Kecamatan Tapos, sedang menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan layanan publik dan atau layanan dari pemerintah. (2) karakteristik wilayah Kecamatan Tapos, Kota Depok sebagai daerah resapan air wilayah selatan Jakarta sekaligus daerah industri manufaktur dan pemukiman merupakan hal yang sangat kompleks dan sangat menantang kemampuan manajemen tata ruang dan pemerintahan Pemerintah Kota Depok.

## **B. Perumusan Masalah**

Pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok merupakan terobosan cerdas untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dengan lebih efektif, efisien dan berkualitas. Tetapi, di sisi lainnya, masih ada masalah-masalah lain yang perlu diantisipasi, antara lain menyangkut kesiapsediaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada daerah bentukan pemekaran yang baru dalam melayani masyarakat, upaya koordinasi dengan institusi vertikal, upaya menyelaraskan pemekaran dengan situasi dan kondisi sosial budaya lingkungan setempat dimana perlu sosialisasi pemekaran kecamatan dan implikasinya kepada semua lapisan masyarakat wilayah kecamatan yang dimekarkann, dan lainnya. Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka penelitian ini direncanakan untuk menjawab pertanyaan:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Tapos?
2. Apa kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan pemekaran pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Tapos dan bagaimana kendala-kendala tersebut pelaksanaan pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Tapos?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

### **C.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dan kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok khususnya di Kecamatan Tapos. Selanjutnya, penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana faktor-faktor dan kendala-kendala tersebut mempengaruhi pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok.

### **C.2. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga baik bagi perkembangan keilmuan atau akademis maupun bagi yang memanfaatkan hasil penelitian ini,

Secara rinci, signifikansi penelitian ini adalah:

1. Dalam bidang keilmuan atau akademik, penelitian ini ditujukan untuk menggali secara ilmiah dan sistematis akan permasalahan pemekaran daerah (*catchment area*) yang

selama ini dirasakan masih sedikit literatur ilmiahnya, khususnya dengan kasus di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dan dapat dijadikan pengayaan materi yang terkait dengan pemekaran daerah (*catchment area*) guna revisi IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota pada tahun 2011 dan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah.

2. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana rekomendasi kepada pihak Pemerintah Kota Depok terkait dengan pemekaran kecamatan-kecamatan di wilayahnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah merupakan salah satu wujud dari pembentukan daerah otonom, selain penggabungan suatu daerah. Pemekaran daerah juga merefleksikan kebijakan desentralisasi politis kepada daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Untuk itu, pemekaran daerah harus mengikuti prinsip-prinsip dasar (*main values*), antara lain :

- a. daerah otonomi baru (DOB) harus lebih maju dengan indikatornya pelayanan yang lebih bagus dan menerapkan *good governance*.
- b. sesuai dengan *grand strategy*
- c. memenuhi kriteria dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. (Diamar, 2006)

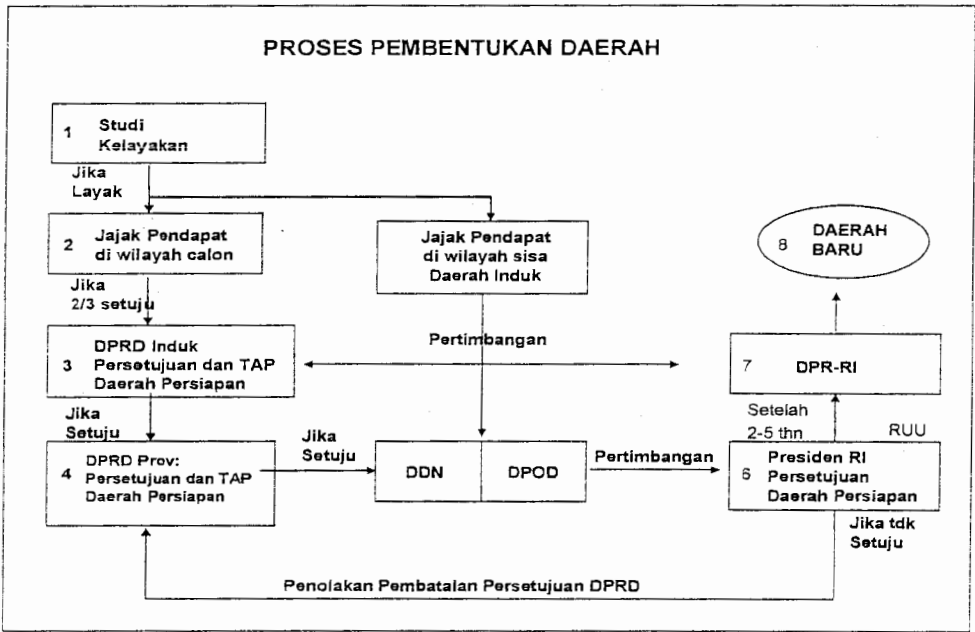
Lebih lanjut menurut Diamar (2006), prosedur pemekaran daerah bagi Daerah Provinsi, menyangkut kepentingan nasional dan harus ada usulan dari masyarakat atau daerah. Adapun bagi daerah baru diperlukan persiapan beberapa unsur, antara lain:

- a. Kepala Daerah
- b. DPRD
- c. Organisasi
- d. SDM
- e. Kekayaan
- f. Keuangan

Selain itu, diperlukan pula rencana strategis (renstra) penataan daerah yang meliputi renstra jangka panjang, jangka menengah dan penetapan. Berikut ini proses pembentukan daerah otonom:

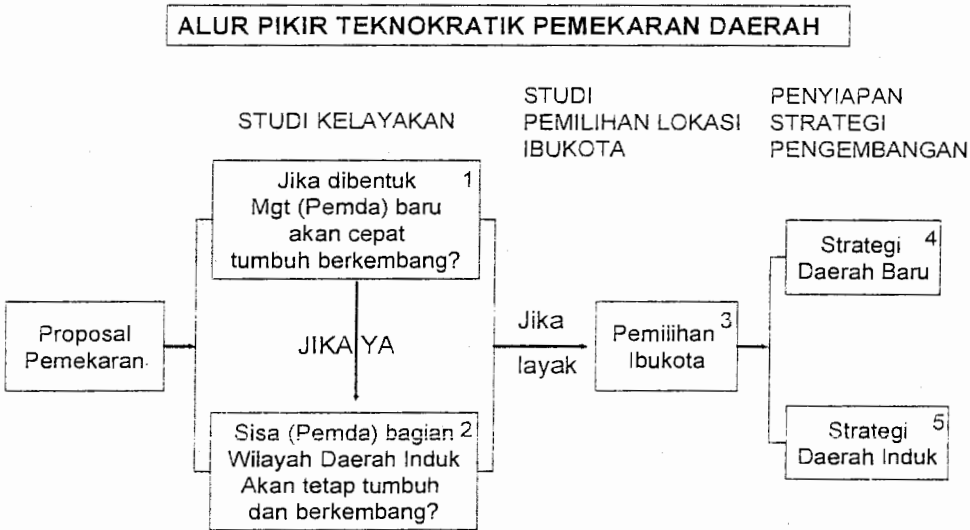


B. Proses Pembentukan Daerah Otonom Dan Alur Pikir Teknokratik Dalam Pemekaran Daerah



Sumber: Damar, Son. "Pembentukan Daerah Otonom: Beberapa Catatan" Makalah. DIA-Pasca UI, 2006

Lebih lanjut Damar (2006) menjelaskan tentang alur pikir teknokratik dalam pemekaran daerah, sebagai berikut:



Sumber: Damar, Son. "Pembentukan Daerah Otonom: Beberapa Catatan" Makalah. DIA-Pasca UI, 2006

### C. Prinsip Studi Kelayakan Pembentukan Daerah

Untuk melakukan pemekaran daerah, perlu studi kelayakan (*feasibility study*) bagi daerah yang baru dan sisa daerah induk. Oleh Damar (2006) dijabarkan sebagai berikut:

1. "Future oriented, bukan keadaan sekarang (jumlah penduduk, PDRB, PAD, sarana dan prasarana, serta pelayanan).
2. Berbasis prediksi SWOT yang akan datang memilih yang terbaik, dalam skala nasional, regional, dan lokal
3. Dengan simulasi beberapa alternatif "*development scenario*".
4. Dengan menghitung "*expected future values*" jika dilakukan "*value engineering*" dan atau "*value conservation*".
5. Memilih yang optimal dari multi values: pertahanan, keamanan, sosial, politik, budaya, ekonomi dan ekosistem".

Adapun kriteria untuk menentukan lokasi ibukota daerah pemekaran, dalam hal ini ibukota kecamatan, menurut Damar (2006) perlu mempertimbangkan, antara lain:

1. "Ibukota sebagai "pusat pertumbuhan wilayah"
2. Sebagai "pusat pelayanan administrasi pemerintahan"
  - a. Jarak (waktu atau fisik) yang adil, di tengah-tengah, ke atau dari pusat-pusat kegiatan dan konsentrasi penduduk;
  - b. Tersedia sarpras dan yan pemerintahan.
3. Sebagai "pusat pertumbuhan wilayah"
  - a. Dikelilingi "*hinterland* potensial" (lahan untuk tan, bun, budidaya kelautan, perikanan, esdm, pariwisata;
  - b. Strategis, terbaik sebagai "*marketing place*", "*marketing network*" dalam wilayah lebih luas, "*catchment area*".
4. Teknis Perkotaan:
  - a. Fisik dasar yang memiliki "*beauty*";
  - b. Bukan yang paling subur;
  - c. Tidak bermasalah: gempa, banjir;
  - d. Tersedia air;
  - e. Mudah/murah pelaksanaan pembangunan."

Selain itu perlu juga mempertimbangkan tatanan ekosistem alam yang saling berhubungan yg dari hulu ke hilir, antara lain (Damar, 2006):

1. "bentang alam atau jasa lingkungan
2. sumber daya laut dan pesisir
3. sumber daya lahan
4. sumber daya hutan
5. sumberdaya mineral
6. sumberdaya air
7. sumberdaya sosial
8. sumberdaya finansial dan teknologi

9. sumberdaya manusia”

#### **D. Dimensi-Dimensi Pemekaran Daerah**

Pemekaran daerah mempunyai dimensi-dimensi sosial, ekonomi dan politik. Hal ini dikemukakan oleh Ringland dalam Maksum (2007) yang mencontohkan bagaimana pembangunan Kota-kota di Inggris dalam menyikapi permasalahan lingkungan dengan landasan beberapa dimensi yang

- (1) nilai-nilai sosial (*social value*) antara individual dan komunitas;
- (2) sistem ‘*governance*’ antara saling ketergantungan (*interdependence*) dan otonomi.

Hasilnya adalah ada empat skenario berikut:

- a. pasar global; jika *interdependence* dan individual;
- b. keberlanjutan global; jika *interdependence* dan komunitas;
- c. urusan lokal (*local stewardship*); jika komunitas dan otonom; dan
- d. *national enterprise*; jika otonom individual.

Pada dasarnya pemekaran daerah dewasa ini tidak lepas dari pendekatan *new public service* yang menjadi pijakan reformasi pelayanan publik. Esensi dari *new public service* mengacu pada kewarganegaraan (*citizenship*), demokrasi dan pelayanan dalam kepentingan publik sebagai alternatif dari pendekatan model yang berdasarkan teori ekonomi manajerial dan kepentingan pribadi yang dominan digunakan pemerintah secara umum sekarang ini.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai suatu keutuhan, memandang manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian. (Moleong,1995:27). Oleh karena itu, penelitian kajian bahan ajar ini memotret faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran kecamatan di Kota Depok berdasarkan Perda Kota Depok No. 08 Tahun 2007 (Studi Kasus Kecamatan Tapos). Esensi penelitian kualitatif, menurut (Soeprapto dan Sumarah,SR,2007:2.5). adalah:

“ ...mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasan dan interpretasi mereka dengan situasi dan kondisi di sekitarnya...”

Seperti yang disampaikan di atas, bahwa penelitian ini adalah penelitian deskriptif artinya mendokumentasikan gejala yang berkepentingan, dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok dengan studi kasus Kecamatan Tapos.

##### B. Studi Kasus

Desain penelitian penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Artinya penelitian pengayaan bahan ajar pada prinsipnya adalah memilih suatu kejadian atau gejala untuk diteliti, dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok. Seperti yang dinyatakan oleh Neuman (2006:40) bahwa studi kasus (*case study*) adalah:

*"...examines in depth, many features of a few cases over a duration of time...the data are usually more detailed, varied, and extensive...case study uses the logic of analytic instead of enumerative induction."*

### **C. Lokasi penelitian**

Penelitian yang dilakukan berlokasi di instansi dan wilayah kerja Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat khususnya pada Kecamatan Tapos.

### **D. Metode Pengumpulan Data Lapangan**

Metode pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data wawancara mendalam (*in-depth interview*), pengamatan dan dokumenter yang berasal dari sumber bukan manusia (*non-human resources*) (Soeprapto dan Sumarah, SR, 2007:5.17). Berikut ini rincian teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan peneliti, antara lain:

#### **1. Penelitian Lapangan**

Kegiatan penelitian didahului dengan observasi pada tempat-tempat yang terkait pemekaran kecamatan-kecamatan, dalam hal ini Kantor Kecamatan Tapos selaku kecamatan hasil pemekaran kecamatan di Kota Depok, Kantor Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Depok. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk merekam peristiwa di lapangan, dengan cara pengamatan dan pencatatan sistematis akan permasalahan pemekaran Kecamatan Tapos.

#### **2. Wawancara Mendalam**

Menurut Cresswell (1994:146), di dalam interview, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan peneliti dapat melakukan *probing* terhadap jawaban-jawaban informan sehingga tetap terpusat pada pokok permasalahan penelitian dan peneliti dapat meminta penjelasan jawaban dari informan yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Cresswell (1994:146) bahwa "Protokol merekam informasi dapat ditetapkan yang mengidentifikasi (a) informasi tentang dokumen atau materi dan (b) kategori-kategori kunci yang dicari peneliti dalam sumber informasi." Untuk itu dalam menentukan informan kunci berdasarkan kriteria atau beberapa pertimbangan (Sudikan, Setya Yuwana dalam Bungin (ed), 2001:63), antara lain:

“(1) orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi dengan permasalahan yang diteliti; (2) usia orang yang bersangkutan telah dewasa; (3) orang yang bersangkutan sehat jasmanai dan rohani; (4) orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk menjelekkan orang lain; (5) orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang diteliti; dan lain-lain”

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok dengan studi kasus Kecamatan Tapos, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan atau narasumber, yang terdiri dari pihak internal organisasi dan dari ahli atau akademisi pada bidang pemerintahan dan administrasi publik. Beberapa informan atau narasumber tersebut, antara lain:

- A. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Depok.
- B. Kepala Subbagian Pemerintahan Umum Daerah Kota Depok.
- C. Kepala Seksi Pemerintahan pada daerah pemekaran kecamatan yang baru, yakni Kecamatan Tapos sesuai lokus penelitian.
- D. Pakar pemerintahan dan administrasi publik, Prof. DR. Irfan Maksum Islami.

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi, sehingga hasil wawancara peneliti dengan kedua belah pihak tersebut dapat dipadu silangkan (*cross checks*) untuk diambil simpulannya.

### **3. Studi Literatur**

Studi literatur dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang dapat mendukung data primer yang dihasilkan dari studi lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur sesuai tema penelitian pemekaran wilayah Kota Depok untuk mendapatkan data, dengan sumber literatur buku-buku, khususnya Laporan Penelitian Penataan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Kota Depok, yang dibuat oleh Pusat Kajian Pemerintahan-STPDN Depdagri pada tahun 2003 (guna mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan tema dan pokok permasalahan penelitian sehingga dapat dijadikan dasar untuk menganalisis pokok permasalahan penelitian ini).

#### **E. Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dimulai dengan memindai seluruh data yang tersedia dari wawancara mendalam dengan narasumber baik pakar dan *key informan*, studi literatur serta observasi Kecamatan Tapos. Kemudian dilanjutkan dengan reduksi data melalui pembuatan abstraksi,

menyusunnya dalam satuan-satuan, lalu dikategorisasi, berikutnya membuat koding dan tahap akhir analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (Moleong,1995:190). Singkatnya, pekerjaan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya (Moleong, 1995:103).

## BAB IV

### TEMUAN dan ANALISIS

Wilayah Kecamatan Tapos yang berada dalam lingkup Kota Depok, merupakan wilayah yang berbatasan dengan wilayah selatan DKI Jakarta, merupakan wilayah *hinterland* Ibu Kota Negara, yangmana dalam *master plan* peruntukan tata ruangnya untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Perkembangan yang pesat di Kota Depok termasuk Kecamatan Tapos ditandai dengan adanya peningkatan signifikan populasi penduduk, kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik di wilayah ini. Sebagai gambaran, saat ini, diperkirakan populasi Kota Depok mencapai 1.339.263 orang (diunduh dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Depok#](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok#) pada hari Kamis 21 Oktober 2010 pk1.14.24). Adapun Kecamatan Tapos, meliputi wilayah 3.125.293 Ha, dengan populasi sebesar 185.520 jiwa. Oleh sebab itu, muncul wacana pemekaran kecamatan di Kota Depok, termasuk pemecahan Kecamatan Tapos.

Dari sisi kebijakan publik, pada hakikatnya pemekaran kecamatan (termasuk Kecamatan Tapos) di Kota Depok ditujukan untuk memperkecil dampak negatif pembangunan wilayah Depok sebagai *hinterland* DKI Jakarta, sehingga pengembangan dan pemekaran kecamatan di Kota Depok tersebut dapat meminimalisasi ketertinggalan pembangunan dari wilayah "tetangganya" DKI Jakarta selain dari kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah Kota Depok sendiri yang lebih dulu maju. Pelaksanaan pemekaran kecamatan di Kota Depok dari 6 (enam) menjadi 11 (sebelas) kecamatan merupakan implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok. Mekanisme pemekaran kecamatan di Kota Depok memang perlu dimonitoring dan dievaluasi pada tahap perencanaan, proses pemekaran dan pasca pemekaran. Hal ini menjadi suatu catatan pekerjaan Pemerintahan Kota Depok yang dipimpin oleh Walikota Depok. Untuk itu, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tapos Kota Depok.

#### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Tapos Kota Depok**

Pemekaran kecamatan Kota Depok dilatarbelakangi oleh kebutuhan layanan publik yang optimal dan mampu terakses publik secara efektif dan adil, dimana diperkirakan penduduk Kota



Depok naik 5% setiap tahunnya. Pada awalnya ada 6 kecamatan dan kini 11 kecamatan untuk sekitar 1 juta penduduk, sehingga rasionya 1 kecamatan dapat melayani 100.000 penduduk. Hal ini disampaikan oleh Prof. DR. Irfan Maksum pada hari Rabu, September 2010, pkl.16.05 WIB:

”....nah kalau ditanya seberapa perlu pemekaran kecamatan di Kota Depok, jelas perlu ! (*nadanya tegas*) sebab penduduk Depok naik 5%, katakanlah sekarang 1 juta lebih; pada awal 6 (kecamatan) jadi 11 (kecamatan), 11 itu untuk sekitar 1 juta orang, jadi 1 kecamatan rata-rata (melayani) 100.000 penduduk. Jika dilihat dari *catchment area*, maka kapasitas rendah; dari 6 kecamatan sehingga perlu 11 kecamatan. Nah, 11 kecamatan, optimal sudah apa belum perlu diteliti...”

Dari uraian di atas, dari sisi kajian akademik, pemekaran kecamatan di Kota Depok memang dibutuhkan mengingat tingginya percepatan jumlah penduduk dan luas wilayah dalam konteks aspek rasional.

#### (1) **pengembangan wilayah**

Kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di kota Depok diselaraskan kebutuhan wilayah Depok yang menyangkut aspek geografis, demografi dan kultural wilayah Depok, antara lain, perkembangan sebaran penduduk dan situasi kondisi pluralisme aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Depok itu sendiri. Ciri khas aspek sosio-kultural masyarakat Kota Depok sendiri (termasuk wilayah Kecamatan Tapos) menunjukkan adanya pluralisme yang akhirnya mengacu pada konsep *melting pot society*, dimana jika ditilik dari sejarah Kota Depok, seperti yang dituturkan dalam situs berikut:

“Pada masa kejayaan VOC sejak akhir abad ke-17 hingga per-tengahan abad ke-18 hampir semua orang Belanda di Batavia dan sekitarnya yang kaya raya memiliki sejumlah besar pekerja. Tumbuh kembangnya jumlah pekerja antara lain disebabkan kemenangan-kemenangan yang diraih VOC atau Belanda dalam menguasai suatu daerah, yang kemudian diangkut ke Pulau Jawa. Pada era tersebut, hidup seorang tuan tanah ... Cornelis Chastelein yang menjadi anggota Read Ordinair atau pejabat pengadilan VOC...Pada 18 Mei 1696, ia membeli tiga bidang tanah di hutan sebelah selatan Batavia yang hanya bisa dicapai melalui Sungai Ciliwung dan jalan setapak. Ketiga bidang tanah itu terletak di bilangan Mampang, Karanganyar, dan Depok. Tahun itu juga, ia mulai menekuni bidang per-tanian di bilangan Seringsing (Serengseng) .Untuk menggarap lahan pertaniannya yang luas itu, ia mendatangkan pekerja dari Bali, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Ternate, Kei, Jawa, Batavia, Pulau Rate, dan Filipina. Semuanya berjumlah sekitar 120 orang....Perlahan muncul di sini sebuah padepokan Kristiani yang disebut De Eerste Protestante Organisatie van Kristenen, disingkat Depok. Semboyan mereka Deze Einheid Predikt Ons Kristus yang juga disingkat Depok.” (<http://panser.withboards.com/t182-sejarah-kota-depok> diunduh hari Rabu, 12 Januari 2011 pkl. 15.36 WIB)

Di atas adalah gambaran pluralisme yang terjadi secara historikal pada masa kolonialisme Belanda. Kini, pluralisme secara vertikal juga menambah tatanan masyarakat Kota Depok, dengan adanya kelompok masyarakat kampung dan warga Perumnas atau perumahan. Jurang kelas sosial ini hanya dapat diwadahi dengan adanya pemekaran kecamatan, khususnya di wilayah Kecamatan Tapos. Wilayah Kecamatan Tapos, banyak dihuni oleh masyarakat asli Betawi-Sunda yang bertempat tinggal di sekitar perumahan dengan pendatang yang kebanyakan tinggal di komplek perumahan. Warisan corak sosio-kultural masyarakat Kota Depok masa kini juga mewarnai Kecamatan Tapos terlihat dari adanya masyarakat Kecamatan Tapos yang heterogen, baik dari kultur (Sunda, Betawi dan lainnya) dengan dominan kultur Sunda-Betawi sebab Kecamatan Tapos, dahulunya masuk dalam wilayah Bogor, dan berbatasan langsung dengan Bogor. Demikian gambaran perkembangan sebaran penduduk dan situasi kondisi pluralisme aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Tapos (*as melting pot society*).

Salah satu dasar terbitnya kebijakan pemekaran kecamatan, khususnya dari kecamatan induk Cimanggis menjadi kecamatan Cimanggis dan Tapos, dilakukan berdasarkan hasil Penelitian Penataan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Kota Depok tahun 2003 sebagai studi kelayakan kebijakan pemekaran wilayah di kota Depok. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa calon kecamatan pemecahan memiliki keunggulan potensi dibandingkan calon kecamatan induk dan rencana pemecahan calon kecamatan nantinya tidak akan menyebabkan calon kecamatan pemecahan menjadi lemah. (Pusat Kajian Pemerintahan-STPDN Depdagri (2003) Laporan Penelitian Penataan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Kota Depok: 61). Berikut ini tabel potensi calon Kecamatan Cimanggis (induk) dan calon Kecamatan Tapos (pemecahan):

Tabel I. Potensi Calon Kecamatan Cimanggis (Induk) dan Calon Kecamatan Tapos (Pemecahan)

No.	Variabel	Skor Standar	Skor calon Kecamatan Cimanggis	%	Skor calon Kecamatan Tapos	%
1.	Demografi	128	121,60	95,00	119,00	92,97
2.	Orbitrasi	16	13,60	85,00	9,25	57,81
3	Pendidikan	360	294,00	81,67	322,40	89,58
4	Kesehatan	240	222,00	92,50	217,50	90,63
5	Transportasi	56	46,20	82,50	43,75	78,13
6	Komunikasi	112	100,80	90,00	98,88	88,28
7	Perekonomian	240	202,00	84,17	192,50	80,21
8	Sosial budaya	80	57,00	71,25	66,25	82,81
9	Pertanian	64	48,00	75,00	51,00	70,69
10	Peternakan	16	12,00	75	13,50	84,38
11	Sosial Politik	48	40,00	85,00	40,00	83,33
12	Partispasi Masyarakat	160	174,00	108,75	160,00	100,00
13	Sosial	16	14,80	92,50	15,00	93,75

No.	Variabel	Skor Standar	Skor calon Kecamatan Cimanggis	%	Skor calon Kecamatan Tapos	%
	Kemasyarakatan					
14	Kamtibmas	32	24,80	77,50	26,50	82,81
15	Ketenagakerjaan	36	31,80	88,33	33,00	91,67
	Jumlah	1.604	1.403	85,61	1.409	85,07

Sumber : Pusat Kajian Pemerintahan-STPDN Depdagri (2003). Laporan Penelitian Penataan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Kota Depok, hal. 61

Dari potensi tersebut, berdasarkan hasil Penelitian Penataan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Kota Depok, direkomendasikan disain strategi potensi pada Kecamatan Tapos, dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. Disain Strategi Potensi Pada Kecamatan Tapos

No.	Variabel	Skor di bawah rata-rata	Pilihan tindakan
1.	Orbitrasi	100 – 57,81 = 42,19	Relokasi pusat pemerintahan, pelayanan dan ekonomi masyarakat serta meningkatkan sarana transportasi dan komunikasi
2.	Transportasi	100 – 78,13 = 21,87	Pembangunan jalan dan penyediaan sarana transportasi yang mencukupi bagi masyarakat dan kemudahan kepemilikan kendaraan sendiri untuk menunjang kegiatan perekonomian dan untuk kelancaran aktivitas rutin
3	Pertanian	100 – 79,69 = 20,31	Pemanfaatan lahan untuk sarana pertanian yang meliputi persawahan, palawija, sayuran maupun buah-buahan serta kemungkinan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian tanaman pangan
4	Perekonomian	100 – 80,21 = 19,79	Fasilitasi pembentukan dan peningkatan peran lembaga keuangan, koperasi, pasar, warung dan pertokoan, serta pembangunan sarana rekreasi seperti penyediaan tempat penginapan dan tempat hiburan untuk menarik minat pendatang
5	Kamtibmas	100 – 82,81 = 17,19	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian, ketertiban untuk meminimalisir gangguan kamtibmas melalui penyediaan sarana keamanan seperti pos jaga, kelengkapan ronda dan penyediaan personil yang memadai serta kerjasama dengan unit kemandirian terkait seperti polisi, hansip dan linmas
6	Sosial budaya	100 – 82,81 = 17,19	pembangunan sarana ibadah yang memadai bagi masyarakat seperti masjid, surau/langgar, gereja, pura dan vihara dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, penyediaan sarana sosial seperti panti, penyediaan fasilitas olah raga dan sarana kesenian
7	Sosial Politik	100 – 83,33 = 16,67	Pendidikan dan sosialisasi politik untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, pemberdayaan ormas dan pemberdayaan partai politik dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan
8	Peternakan	100 – 84,38 = 15,62	Mendorong pertumbuhan sektor peternakan melalui bantuan modal dan bantuan teknis baik untuk peternakan besar, sedang maupun unggas

Sumber : Pusat Kajian Pemerintahan-STPDN Depdagri (2003). Laporan Penelitian Penataan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Kota Depok, hal. 65-66

Kebijakan tersebut diharapkan memuat pula mekanisme mengantisipasi adanya konflik tata ruang dengan wilayah kecamatan lainnya setelah pemekaran wilayah kecamatan dilaksanakan. Untuk saat ini, ada perencanaan terminal Jatijajar sebagai terminal kota Depok, mengingat semakin padatnya kuantitas alat transportasi dan infrastruktur jalan yang masih minim atau kurang. Hal ini disampaikan oleh Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tapos, RM. Haryadi, S.Sos (Jum'at, 24 September 2010, pkl. 15.37 WIB):

"Kita sekarang dalam pengembangan wilayah, ya...karena pemekaran (kecamatan), ini ada rencana pembangunan terminal Jatijajar yang nanti jadi terminalnya Depok, kan sebelumnya di sebelahnya kantor Walikota, di Margonda dengan ruang yang masih terbatas...nah ini untuk mengatasi juga masalah makin banyaknya kendaraan tapi infrastruktur jalannya masih minim."

Pada pelaksanaannya, pemekaran Kecamatan Tapos juga dilakukan untuk mengalihkan perputaran roda perekonomian wilayah Tapos yang sebelumnya banyak dilakukan ke Cibinong, Kramat Jati dan Cileungsi, menjadi ke wilayah Tapos sendiri dalam rangka peningkatan potensi ekonomi dan pengembangan wilayah. Hal ini dijelaskan oleh Drs. Jaka Susanta, MH (Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 14.56 WIB) selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Tapos, sebagai berikut:

"...tadinya perputaran ekonomi ke ke Cibinong, Kramat Jati dan Cileungsi ke di harapkan dengan adanya pasar tradisional – modern (yang akan dibangun), perputaran bisa di daerah ini sendiri."

Upaya tersebut didukung pula oleh rencana pengembangan wilayah Tapos dalam rangka pemerataan pembangunan, yang dimulai dengan:

- (1) pembangunan infrastruktur transportasi (rencana Terminal Jatijajar sekelas Pulogadung dan Kampung Rambutan) dimana rencana pembangunan Terminal Jatijajar tersebut dari lebar jalan 4 meter ditingkatkan menjadi 42 meter.
- (2) rencana pembangunan pasar tradisional modern
- (3) sentra rumah pemotongan hewan Kota Depok

Hal ini dikemukakan kembali oleh Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 15.17 WIB) sebagai berikut:

"...pemerataan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam pemekaran kecamatan Tapos...bisa terlihat dalam waktu dekat ini. Terminal Jatijajar sekelas Pulogadung dan Kampung Rambutan, yang bisa antarkota antarprovinsi, Terminal Jatijajar ini juga kan ditingkatkan infrastrukturnya, yang tadinya kurang lebih 4 meteran dilebarkan atau ditingkatkan jadi 42 meter. Terminal Jatijajar ini sudah menjadi magnet tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan lapangan kerja yang tadinya terbatas jadi luas...Rumah

pemotongan Hewan diusulkan kepada Walikota...Pasar tradisional modern...apa itu,...yah istilahnya yang tradisional tapi modern-*lah* penataannya, yang gak becek, sudah dilakukan kajian oleh konsultan, lokasi yang tepat, yang kita identifikasikan sebagai lokasi yang tepat...”

Lebih lanjut, pengembangan wilayah Tapos juga bersifat strategis, mengingat adanya pembukaan pintu tol Jagorawi dekat wilayah Kecamatan Tapos, yakni tol Cimanggis – Jagorawi (Cijago) melintas di wilayah Tapos. Hal tersebut diketahui dalam wawancara dengan Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum’at, 10 Desember 2010, pkl. 15.45 WIB) sebagai berikut:

”...adanya pembukaan pintu tol Jagorawi lagi...dekat wilayah Kecamatan Tapos, yakni tol Cijago melintas di wilayah kita juga, otomatis mobilitas penduduk lebih dinamis lagi...”

Adanya peningkatan mobilitas penduduk yang lebih dinamis akan menimbulkan potensi masalah urbanisasi atau migrasi dari wilayah kecamatan tetangga atau luar wilayah dan pertumbuhan populasi penduduk. Hal ini juga dicermati oleh Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum’at, 10 Desember 2010, pkl. 15.57 WIB) yang terungkap dalam wawancara berikut:

”... mobilitas penduduk lebih dinamis...dengan pertumbuhan, urbanisasi harus diantisipasi; urbanisasi dari luar kota atau dari (wilayah) Depok. Untuk itu *diusulin* ada trayek angkot ke Dishub Kota Depok...kan selama ini masih (digunakan) kendaraan pribadi dan ojek...”

Selain itu, peluang pertumbuhan ekonomi semakin terbuka dengan hadirnya kantor kecamatan, banyak kegiatan ekonomi tumbuh di sekitar kantor kecamatan. Hal ini dinyatakan oleh Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum’at, 10 Desember 2010, pkl. 15.14 WIB) sebagai berikut:

”...(ibu) bisa lihat, disebelah kita (kantor Kecamatan Tapos) banyak usaha-usaha (ekonomi) baru yang muncul, warung-warung, rumah makan, yah...macam-macam usaha jasa dan barang-lah sekarang tambah banyak...”

## **(2) mendekatkan (distribusi) layanan publik kepada masyarakat**

Menurut Prof. DR. Irfan Maksum, hal ini tergantung pada layanan yang menyangkut perkembangan suatu wilayah termasuk populasi (*based on teritory*). Berikut petikan wawancaranya (Rabu, 29 September 2010, pkl.14.00):

”...karena pemerintahan Kota Depok sudah jalan, harus ada desain organisasi Pemda yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah, khususnya pada bidang ekonomi dan layanan publik. Organisasi Pemda terdiri dari sektoral dan teritorial, dimana teritorial ini *based on teritory* pada kecamatan sampai kelurahan untuk mendekatkan layanan.”

Untuk itu, Pemerintah Kota Depok dalam membentuk desain organisasi yang baik untuk mewadahi tujuan pemekaran kecamatan, khususnya untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, melakukan upaya penyiapan masing-masing perangkat kecamatan baru untuk mempersiapkan seluruh kelengkapan tenaga-tenaga teknis untuk dapat beroperasi secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan upaya penyiapan seluruh perangkat-perangkatnya, antara lain, dana dengan anggaran mencapai Rp. 6 sampai 11 miliar, kantor (sewa), perlengkapan *furniture* dan administrasi. (<http://news.okezone.com/read/2009/11/02/338/271270/depok-dimekarkan-menjadi-11-kecamatan>, Depok Dimekarkan Menjadi 11 Kecamatan Senin, 2 November 2009 diunduh pada hari Jum'at 22 Oktober 2010 pkl. 09.55)

Pertimbangan perlunya pemekaran wilayah kecamatan juga didorong oleh adanya tuntutan pemekaran wilayah (*teritory*) antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah, tetapi yang utama adalah perkembangan penduduk. Hal ini ditegaskan oleh Prof. DR. Irfan Maksum pada hari Rabu, September 2010, pkl.14.36 WIB:

”...pertimbangan (*based on*) *teritory* sendiri apakah cukup dilakukannya pemekaran, harus di didorong oleh adanya tuntutan pemekaran wilayah (*teritory*) antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah, yang keduanya menyangkut perkembangan penduduk. Selain itu efektivitas layanan perlu dipertimbangkan kembali dan desain organisasi harus dikaitkan dengan sektoral: apakah betul layanan di kecamatan menyangkut kebutuhan penduduk atau tidak?... Jadi kalau bisa dilayani dengan layanan yang bersifat sektoral atau jika yang dibutuhkan layanan sektoral, maka daerah kecamatan tidak harus dimekarkan. Nah....boleh tidaknya kecamatan dimekarkan misalnya untuk memudahkan layanan informasi penduduk dan koordinasi dengan kelurahan. Tapi kalau untuk urusan layanan kebersihan dan kesehatan, maka tidak perlu (kecamatan) dimekarkan.”

Signifikansi pemekaran kecamatan di Kota Depok, khususnya pada Kecamatan Tapos, berikutnya adalah mengurangi biaya tinggi dalam layanan kependudukan, misalnya layanan KTP. Hal ini dinyatakan oleh Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tapos, RM. Haryadi, S.Sos (Jum'at September 2010, pkl. 15.47 WIB):

”...tujuan pemekaran itu, antara lain mengurangi biaya tinggi terutama layanan KTP jadi lebih mudah...”

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tapos dipengaruhi oleh faktor pengembangan wilayah yang ditujukan untuk efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kualitas layanan publik.

### **(3) pengelolaan anggaran secara akuntabel**

Pada Kecamatan Tapos, walaupun dana anggaran berasal APBD Kota Depok, khususnya untuk kegiatan rutin, namun perencanaan dari pihak Kecamatan tetap ada. Berarti, pada Kecamatan Tapos, sudah berjalan perencanaan kegiatan rutin operasional untuk mendukung kegiatan Dinas-dinas seperti halnya pada Kecamatan Cimanggis sebagai kecamatan induk. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Kasie Pemerintahan Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 15.17 WIB) sebagai berikut:

”...ya kita (Kecamatan tapos) hanya penerima manfaat (kebijakan), jadi perencanaan tetap ada tapi dana dari Walikota (APBD Kota Depok), anggaran untuk kegiatan rutin operasional yang mendukung kegiatan-kegiatan Dinas...”

Secara struktur fungsional, Kecamatan Tapos merupakan perpanjangan tangan dari Kota Depok. Hal ini ditegaskan oleh Prof. DR. Irfan Maksum pada hari Rabu, September 2010, pkl.15.05 WIB:

”...Perlu diketahui pula Camat itu alatnya Bupati atau walikota; daerah atasannya otonom, jadi kecamatan merupakan alatnya daerah otonom, anggarannya dalam rangka (daerah) atasannya otonom dan akuntabel jadi harus bertanggungjawab kepada (daerah) atasannya.”

### **(4) peningkatan kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya**

Dalam hakikat pelaksanaannya, pemekaran Kecamatan Tapos terkait pula dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk peningkatan kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Hal ini dipaparkan Kasie Pemerintahan Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 15.20 WIB) sebagai berikut:

”...yah kecamatan itu sebagai koordinator kelurahan, nah...ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang banyak, usulan dari RW, nah adanya pemerintahan kecamatan, masyarakat maunya kecamatan dapat meningkatkan dukungan sosial atau keagamaan. Begitu juga rasa memiliki timbul, *sense of belonging*-nya timbul antara rakyat dengan kecamatan, nah kemarin...ya Pak (sambil menoleh ke Kasie Tramtib dan Kasie Ekbang) pada ultah Depok kapan tuh... (kembali menoleh ke Kasie Tramtib dan Kasie Ekbang) 27 April yah...yah 27 April diadakan jalan santai, pesertanya sepuluh ribu, jadi masyarakat merasa betul ingin daerahnya maju, apa aja kegiatan banyak diikuti-*in*, diada-*in*, jadi sering ngasih undangan kegiatan ke kita (pejabat Kecamatan Tapos), kayak tadi usulan-usulan kegiatan keagamaan, khususnya hari-hari besar Islam...”

Secara normatif, kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya dilakukan melalui forum musrenbang. Namun pertemuan rutin forum musrenbang belum intensif, pertemuan hanya berkaitan dengan momentum tertentu misal pertemuan seluruh Ketua RT dengan Walikota dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB, kegiatan imunisasi masyarakat dari endemi filariasis. Hal ini dinyatakan oleh Kasie Pemerintahan Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 15.26 WIB) sebagai berikut:

”...pertemuan dengan Ketua-Ketua RT, RW biasanya untuk perencanaan pembangunan dan kalau ada moment-moment tertentu, misalnya pertemuan seluruh Ketua RT dengan Walikota dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB, dan yang terbaru kemarin *nih* ...kegiatan imunisasi masyarakat dari endemi filariasis...”

Dari aspek paradigma pemerintahan daerah, menegaskan fenomena di atas, memang ada kaitan pemekaran wilayah (dalam hal ini Kecamatan Tapos) dengan peningkatan kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Hal ini dikemukakan oleh Prof. DR. Irfan Maksum pada hari Rabu, September 2010, pkl.15.07 WIB:

”...semakin mekar, semakin besar kota kecamatan, semakin besar akses masyarakat mengawasi aparatur pemerintahan; semakin mekar ibukota kecamatan yang ada sebagai pusat pemerintahan maka layanan pemerintah semakin mendekati masyarakat. Layanan yang diberikan bersifat teritorial yang menyangkut kependudukan; tapi... harus dilihat juga apakah pemekaran itu juga diikuti pula pembangunan layanan sektoral, misalnya puskesmas?...”.

Bentuk nyata yang menjawab pernyataan di atas ditunjukkan dengan konsistensi kebijakan pemekaran yang berbasis teritorial, bukan untuk semata layanan sektoral saja, contohnya layanan ketertiban umum dan keamanan yang dilakukan oleh pihak POLRI terkait kebijakan pemekaran kecamatan di Kota Depok. Walaupun kecamatan sudah dimekarkan, sejumlah kepolisian sektor (polsek) tidak ikut ditambah dan masih menginduk sesuai kepolisian sektor yang lama di 6 (enam) kecamatan. (<http://news.okezone.com/read/2009/11/02/338/271270/depok-dimekarkan-menjadi-11-kecamatan>, Depok Dimekarkan Menjadi 11 Kecamatan Senin, 2 November 2009 diunduh pada hari Jum'at 22 Okt 2010 pkl. 9.55). Berarti, dari sudut perspektif administrasi negara, khususnya aspek pemerintahan daerah, untuk pemekaran suatu wilayah, dalam hal ini kecamatan, harus mengacu pada perkembangan penduduk dan pertimbangan efektivitas layanan publik yang bersifat teritorial.



**(5) terciptanya demokratisasi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah berbasis masyarakat yang demokratis**

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah berbasis masyarakat yang demokratis adalah pembayaran pajak daerah dan retribusi lainnya yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Setelah dimekarkan, Kecamatan Tapos menunjukkan adanya animo pembayaran masyarakat atas iuran PBB, IMB dan retribusi lainnya. Hasil PBB pada Kecamatan Tapos sebagai kecamatan hasil pemecahan sejak 2 November 2009, pada 4 November 2010 adalah 3.249.485.963 (52,58% dari target 2010; Sumber: Realisasi Penerimaan PBB Bulan Nopember Kecamatan Tapos Kota Depok, 2010).

Kiat peningkatan pembayaran iuran PBB pada Kecamatan Tapos adalah dalam setiap pengajuan surat ijin, masyarakat diminta untuk menunjukkan bukti lunas PBB dan untuk pembayarannya bekerjasama *collection tax* dengan BJB di tiap kelurahan. Hal ini dinyatakan oleh Kasie Pemerintahan Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 15.26 WIB) sebagai berikut:

“ ...yah sejak Kecamatan Tapos ada, PBB naik tapi belum signifikan, yah... karena masih baru kan, tempat pembayaran sekarang masih di Kelurahan Tapos yang tempatnya lebar...Untuk trik peningkatan PBB, ini caranya setiap buat surat ijin, orang tersebut musti bawa bukti lunas PBB, kerjasama dengan BJB di kelurahan...itu *offline*-nya, *online*-nya di Kecamatan Tapos yang masih pinjem tempatnya Kelurahan Tapos...”

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah berbasis masyarakat yang demokratis juga ditunjukkan dengan banyaknya proyek-proyek pembangunan swadaya masyarakat, misal jalan lingkungan, mushola, jalan air. Hal ini dinyatakan oleh Kasie Pemerintahan Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 15.28 WIB) sebagai berikut:

“ ...dalam forum musrenbang yang dihadiri Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan ormas Tapos, perencanaan tahun 2011 sudah dilakukan pada bulan Pebruari – Maret 2010 yang lalu. Usulan dari masyarakat melalui musrenbang disesuaikan dengan kuota-kan, ditentukan skala prioritas. Jadi beda dengan jaman dulu, jaman sekarang sudah diberi kuota, yang (Kecamatan Tapos) tinggal buat skala prioritasnya...”

Dari pernyataan di atas, terlihat adanya demokratisasi dalam perencanaan pembangunan yang bersifat terkendali dimana usulan dari masyarakat melalui musrenbang (*bottom up*) diakomodasi dan disesuaikan dengan kuota, ditentukan skala prioritas.

Penelitian Penataan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Kota Depok tahun 2003 menunjukkan bahwa dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Tapos, sebagai calon kecamatan pemecahan, memiliki nilai skor variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai skor yang baik dan sesuai standar minimal kelulusan atau mampu sebagai calon kecamatan pemecahan yang baru (STPDN-Depdagri,2003:62). Saat ini, wujud demokrasi lokal selain dalam perencanaan pembangunan melalui forum musrenbang, juga terlihat dalam pemilihan Ketua RT dan RW, namun masih diwarnai dengan terpilihnya Ketua RT dan RW yang didominasi dari etnis lokal. Dari observasi yang dilakukan peneliti, pada aspek demokrasi lokal, hal yang perlu diwaspadai adalah kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi lokal (apolitis) karena kurang memahami hak-hak politik atau sosialisasi pendidikan politik yang minim, hal ini juga disampaikan oleh Kasie Pemerintahan Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 15.32 WIB) yakni:

”...ada juga yang kontra tapi kecenderungan lebih mendukung, ada, swadaya masih tinggi dalam merencanakan pembangunan...”

Dari pernyataan di atas, menunjukkan dalam proses pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tapos, pembangunan wilayah yang berbasis masyarakat sementara ini cenderung *top-down*, yang ditunjukkan dengan ada kuota dan prinsip skala prioritas dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan pada forum musrenbang.

**(6) peningkatan kesejahteraan masyarakat (keadilan distributif melalui pemekaran kecamatan)**

Faktor yang mempengaruhi pemekaran Kecamatan Tapos yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya arahan desain struktur organisasi Kecamatan Cimanggis yang dimekarkan, yakni Kecamatan Cimanggis yang dimekarkan hanya akan membawahi 7 kelurahan saja, sedangkan sebelumnya 13 kelurahan. Hal tersebut khususnya bertujuan supaya Camat Tapos semakin dapat mengoptimalkan kuantitas dan kualitas kepemimpinannya untuk berkoordinasi dengan para Lurah dan aparaturnya dalam melaksanakan program-program pembangunan dan layanan Pemerintah Kota Depok di wilayah Kecamatan Tapos. Hal ini dikemukakan oleh Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tapos, RM. Haryadi, S.Sos (Jum'at September 2010, pkl. 15.37 WIB):

”...dengan adanya pemekaran kecamatan, yang tadinya Kecamatan Cimanggis mengkoordinasi 13 kelurahan, sekarang menjadi 7 kelurahan ada di Kecamatan Tapos dan 6 kelurahan di Kecamatan Cimanggis, begitu...nah tentunya Pak Camat akan lebih efektif dalam memimpin (Kecamatan) Tapos dan dapat koordinasi baik dengan Lurah-Lurah yang ada di Kecamatan Tapos...”

Berarti, desain organisasi pemekaran kecamatan di Kota Depok, khususnya pada Kecamatan Tapos sudah berusaha melakukan *rightsizing* sekaligus *downsizing* struktur guna memotong rentang kendali yang terlalu luas atau melangsingkan struktur organisasi yang ada sekaligus memudahkan koordinasi sehingga tujuan pemekaran kecamatan dari sudut rentang kendali sudah terlaksana. Selain memudahkan program pembangunan berjalan, juga dapat meminimalisasi biaya tinggi layanan publik. Hal ini dinyatakan oleh Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tapos, RM. Haryadi, S.Sos (Jum’at September 2010, pkl. 15.47 WIB):

”.... pemekaran kecamatan Tapos khususnya dan umumnya di Kota Depok, memudahkan program pembangunan berjalan, makanya kenapa infrastruktur yang sekarang jadi prioritas dibenahi dan dibangun dulu, karena infrastruktur jalan masih kurang, jadi niaga belum optimal-lah...Untuk sekarang ini, dalam bidang saya (ekonomi dan pemberdayaan masyarakat) sekarang yang dilakukan adalah siaga bencana, ada Satgas bidang bencana siaga, yang menangani kesehatan, pelayanan dan sosialisasi IMB, mengurangi kematian ibu dan anak...”

Dari pernyataan di atas, dapat digarisbawahi bahwa tujuan pemekaran kecamatan juga untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui PBB, IMB dan lainnya sekaligus mendistribusikan hasil-hasil pembangunan (yang dibiayai dari PAD) dan layanan publik secara adil kepada masyarakat di wilayahnya dengan fokus pada layanan kesehatan.

Hal yang esensial dari pemekaran kecamatan di kecamatan Tapos adalah tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, dengan program pembangunan yang pro orang miskin. Hal ini ditegaskan oleh Prof. DR. Irfan Maksum pada hari Rabu, September 2010, pkl.16.17 WIB:

”... pemekaran kecamatan, tujuannya kesejahteraan naik yakni pro orang miskin...”

Hal ini selaras dengan PP No. 129 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan kemanan dan ketertiban serta

peningkatan hubungan serasi antara Pusat dan Daerah. Adapun nomenklatur kecamatan dan kelurahan hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007, sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Beji meliputi wilayah kerja: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, dan Kelurahan Tanah Baru.
- 2) Kecamatan Pancoran Mas meliputi wilayah kerja: Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkap Jaya Baru, dan Kelurahan Mampang.
- 3) Kecamatan Cipayung meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan Kelurahan Pondok Jaya.
- 4) Kecamatan Sukmajaya meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Tirtajaya, dan Kelurahan Cisalak.
- 5) Kecamatan Cilodong meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya.
- 6) Kecamatan Limo meliputi wilayah kerja: Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut.
- 7) Kecamatan Cinere meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkal Jati Lama, dan Kelurahan Pangkal Jati Baru.
- 8) Kecamatan Cimanggis meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug.
- 9) Kecamatan Tapos meliputi wilayah kerja: Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap, dan Kelurahan Cimpaeun.
- 10) Kecamatan Sawangan meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih.
- 11) Kecamatan Bojongsari meliputi wilayah kerja: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar,

dan Kelurahan Duren Seribu. (diunduh dari <http://www.depok.go.id/> ,” Wali: Pemekaran Berdampak Positif”, pada hari Senin 19 Oktober 2010, pkl.10.42 WIB)

Untuk itu, perlu juga mempertimbangkan sistem intensif khusus bagi masyarakat yang berada dalam wilayah kecamatan yang dimekarkan. Seperti yang dilakukan oleh negara Jepang, masyarakat yang ingin daerah digabung dengan daerah lain akan diberi insentif khusus berupa kemudahan dalam mendapatkan kredit pinjaman dari lembaga peminjam (Bank dan lainnya) atau alokasi pembagian pajak yang lebih besar dari daerah lainnya yang tidak digabung. (diunduh dari <http://regional.kompas.com/read/2010/04/26/03583282/>,”Pemekaran Melawan Efisiensi”, pada hari Senin 19 Oktober 2010, pkl. 11.18 WIB).

Selain itu, faktor-faktor lingkungan juga mempengaruhi pelaksanaan pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok. faktor-faktor lingkungan tersebut terdiri dari faktor lingkungan internal dan eksternal Kota Depok. Faktor internal mencakup jumlah penduduk dan luas wilayah dalam konteks aspek rasional. Daerah Kota Depok dimekarkan karena perkembangan penduduk, baik kualitas dan kuantitasnya dalam strata, sosial dan ekonomi, sehingga perlu menjadi daerah kota yang otonom. Adapun faktor eksternalnya, ada potensi bersifat irrasional, menyangkut faktor politik dan birokrasi yang *vis a vis* masyarakat, dimana politisi lokal mendambakan pemekaran wilayah Kota Depok yang mengakibatkan birokrasi dapat semakin membengkak, dan dapat mawadahi kepentingan kelompok tertentu. Hal ini menyangkut pembagian sumber daya kekuasaan antar kelompok kepentingan. Hal ini dijelaskan oleh Prof. DR. Irfan Maksum pada hari Rabu, September 2010, pkl.16.24 WIB:

”....faktor internalnya bersifat rasional, mencakup jumlah penduduk dan luas wilayah... faktor eksternalnya, *irrasional*, menyangkut faktor politik dan birokrasi yang *vis a vis* masyarakat, dimana politisi lokal mendambakan pemekaran, birokrasi dapat semakin membengkak, bagi-bagi jatah *resources* yang tidak rasional, bisa terjadi...”

Demikian temuan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tapos selaku salah satu kecamatan baru hasil pemekaran kecamatan Kota Depok.

## **B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Tapos Kota Depok**

Pemekaran kecamatan Kota Depok menjadi hal esensial sebab hal tersebut diperlukan untuk pembangunan Kota Depok dengan tujuan efektivitas layanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya dalam segala bidang. Masalah-masalah yang dihadapi Kecamatan

Tapos sebagai kecamatan hasil pemekaran pada pasca pelaksanaan pemekaran kecamatan di Kota Depok adalah menyangkut masalah peralatan atau infrastruktur, sumber daya manusia aparat kecamatan (termasuk potensi masalah *heavy territory*), kecuali pembiayaan yang didistribusikan dari APBD. Hal ini disampaikan oleh Drs. Dody Setiawan selaku Kasubag Pemerintahan Umum pada Kantor Walikota Depok dalam wawancara pada hari Rabu, 5 Januari 2011 pukul 11.23 WIB sebagai berikut:

”...masalah yang umumnya ditemui oleh kecamatan-kecamatan hasil pemekaran, yaitu 3 (tiga) P, terdiri dari personil, peralatan dan pembiayaan, tetapi pembiayaan belum masalah sebab sudah diakomodir oleh APBD dan pemekaran yang jumlahnya 5 (lima) kecamatan tidak membebani APBD.”

Pada masalah aspek infrastruktur, ternyata kantor Kecamatan Tapos sebagai kecamatan hasil pemekaran masih mengontrak atau sewa gedung namun sudah dekat dengan jalan besar sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan layanan publik sudah dioptimalkan. Hal ini disampaikan oleh Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum’at, 10 Desember 2010, pkl. 15.38 WIB) yakni:

”...sementara ini, kantor kecamatan ( Kecamatan Tapos) masih sewa...sementara, kita masih dalam pembangunan..sekarang kan kita juga sudah di depan jalan raya, gampang nyarinya, masyarakat juga tahu...”

Begitu pula pada aspek peralatan, ditemui kendala misalnya jumlah komputer yang kurang memadai. Hal ini kembali diungkapkan oleh Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum’at, 10 Desember 2010, pkl. 15.42 WIB) yakni:

”...yah sementara, komputer kita sudah ada 3 (tiga) komputer untuk 3 (tiga) Seksi, nah ..”

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah kurangnya komputer untuk melaksanakan pekerjaan operasional, tiap-tiap Seksi menggunakan laptop pribadi untuk mendukung tercapainya efektivitas pekerjaan operasional dan layanan publik. Hal ini kembali diungkapkan oleh Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum’at, 10 Desember 2010, pkl. 15.44 WIB) sebagai berikut:

”... untuk keterbatasan komputer tadi, kita mengatasinya dengan menggunakan *laptop* pribadi, kan sekarang sudah umum...”

Adanya kendala dalam hal prasarana kantor kecamatan hasil pemekaran, terutama yang terkait dengan pengadaan komputer untuk layanan publik juga diakui oleh Drs. Dody Setiawan dalam wawancara pada hari Rabu, 5 Januari 2011 pukul 11.27 WIB sebagai berikut:

”... masalah prasarananya, adalah ada yang belum punya kantor (kecamatan) sendiri, ada yang masih sewa. Oleh sebab itu, tahun 2010 ada pembebasan lahan di Cinere dan Bojongsari untuk kantor kecamatan...masalah komputer masih terbentur anggaran, jadi masih kurang, tapi tetap diakomodir melalui anggaran (penerimaan dan belanja daerah)...”

pemekaran suatu wilayah, dalam hal ini kecamatan, harus mengacu pada perkembangan penduduk dan pertimbangan efektivitas layanan publik yang bersifat teritorial.

Namun hal ini, berpotensi mengandung masalah yang harus diantisipasi, yakni *heavy territory*, artinya kalau suatu wilayah dimekarkan, maka harus ada lurah atau desa yang juga dimekarkan. Masalah ini juga terkait dengan aspek rentang kendali pengawasan, dimana kecamatan merupakan alatnya daerah otonom (Kota atau Kabupaten) yang harus bertanggungjawab kepada daerah atasannya (Kota atau Kabupaten). Hal ini disampaikan kembali oleh Prof. DR. Irfan Maksum pada hari Rabu, September 2010, pkl.14.57 WIB:

”....yang jadi masalah adalah *heavy territory* dimana kalau jumlah penduduk naik, maka perlu rentang kendali pengawasan desa atau lurah, sehingga kalau kecamatan mekar, harus ada lurah atau desa yang mekar juga...”

Dalam kebijakan pemekaran selain masalah *heavy territory*, yang perlu diwaspadai adalah adanya politik terselubung pihak politisi atau partai politik yang ada, dalam menstimulasi kebijakan pemekaran kecamatan adalah memperkuat kekuasaan dan memperbanyak jumlah elit politik dari kelompok kepentingan atau partai politik yang ada yang dapat menduduki kursi legislatif. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan aturan main di kepartaian dan susduk, sebab jumlah daerah pemilihan (dapil) Kabupaten atau Kota, basisnya kecamatan, dimana semakin banyak kecamatan maka semakin banyak peluang memperbanyak perwakilan anggota DPRD Kota/ Kabupaten. Kondisi dan situasi ini dipaparkan oleh Prof. DR. Irfan Maksum pada hari Rabu, September 2010, pkl.15.13 WIB:

”...aturan main di kepartaian dan susduk, dapil Kabupaten atau Kota, basisnya kecamatan, jadi banyak kecamatan maka banyak perwakilan anggota dewan...”

Namun, dalam hal pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tapos, potensi masalah muatan politis dalam keluarnya kebijakan pemekaran kecamatan di kota Depok tersebut, belum terduga dalam penelitian ini, mengingat lokusnya lebih pada pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tapos.

Berikutnya, ada masalah yang ketiga yang menyangkut kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam Kecamatan Tapos yang terbatas, seperti yang dipaparkan oleh Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 16.00 WIB) sebagai berikut:

"...(struktur) kita kebetulan ada Camat, Setcam untuk (urusan) rumah tangga (internal Kecamatan Tapos) dan 3 Kepala Seksi, pada Seksi Tramtib, Seksi Ekbang dan Seksi Pemerintahan, dengan jumlah personil yang terbatas, ya sebetulnya kurang, tapi kita solid...kita (antarseksi) saling memahami-lah tugas satu sama lain dan mengerjakan tugas bersama-sama, saling mengisi-lah, sedikit tapi lebih solid..."

Solusi teknis yang dijalankan oleh para Kepala Seksi di Kecamatan Tapos adalah membentuk struktur matriks (yang diadopsi) dalam melakukan inovasi layanan, dengan cara membuat Satgas Ruang Pelayanan Publik yang ditangani oleh masing-masing 3 (tiga) Kepala Seksi pada bidang Pemerintahan, Ekbang dan Tramtib) berdasarkan *standar operation procedure* (SOP) layanan publik di kantor Kecamatan Tapos. Hal ini Selain itu, ada masalah kuantitas SDM dalam kecamatan Tapos yang terbatas, seperti yang dipaparkan oleh Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 16.03 WIB) sebagai berikut:

"...karena orangnya terbatas (jumlahnya), kita ada bikin ruang pelayanan tanggung jawab bersama masing-masing (para) Kasie, ada SOP-nya."

Potensi masalah yang terakhir dalam pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tapos adalah masalah yang menyangkut konflik administrasi kependudukan yang berpotensi pada tingkat warga (*grassroots*) tetapi masalah ini belum ditemukan pada aparat. Hal ini terkait dengan perubahan data administrasi kependudukan, misalnya pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengingat nomenklatur administrasi wilayah kecamatan yang beralih dari Kecamatan Cimanggis ke Kecamatan Tapos. Hal ini diungkapkan oleh Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. 16.17 WIB) sebagai berikut:

"...ya kita belum nemuin sih masalah-masalah administrasi kependudukan di tingkat aparat dengan berubahnya dari Kecamatan Cimanggis ke Kecamatan Tapos, tapi mungkin kalau di masyarakat, mungkin ada (masalah), sebab ada perubahan nama kecamatan dari Cimanggis ke Tapos, gitu aja, jadi teknis-lah..."



Demikian temuan masalah-masalah yang dihadapi Kecamatan Tapos selaku salah satu kecamatan baru hasil pemekaran kecamatan Kota Depok.

## BAB V

### SIMPULAN dan SARAN

#### Simpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok, khususnya pada Kecamatan Tapos, terdiri dari pengembangan wilayah, mendekatkan (distribusi) layanan publik kepada masyarakat, pengelolaan anggaran secara akuntabel, peningkatan kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, terciptanya demokratisasi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah berbasis masyarakat yang demokratis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (keadilan distributif melalui pemekaran kecamatan). Ke-enam faktor tersebut secara simultan juga mempengaruhi pencapaian tujuan pemekaran kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Tapos sebagai kecamatan hasil pemekaran di kota Depok. Oleh sebab itu, ada faktor lingkungan internal dan eksternal yang juga berperan dalam mempengaruhi ke-enam faktor di atas. Faktor internal mencakup jumlah penduduk dan luas wilayah dalam konteks aspek rasional. faktor eksternalnya, ada potensi bersifat irrasional, menyangkut faktor politik dan birokrasi. Tetapi dalam penelitian ini faktor lingkungan tidak digali lebih lanjut, mengingat faktor lingkungan tidak termasuk dalam lokus penelitian.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tapos (sebagai kecamatan hasil pemekaran), antara lain masalah peralatan atau infrastruktur, sumber daya manusia aparat kecamatan, dengan potensi masalah *heavy territory*, potensi masalah muatan politis dalam keluarnya kebijakan pemekaran kecamatan di kota Depok dan masalah yang menyangkut konflik administrasi kependudukan.

#### Saran atau Rekomendasi

Penelitian ini merupakan penelitian untuk kajian bahan ajar pada bidang studi ilmu pemerintahan. Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah pengayaan bahkan usulan materi baru tentang pemekaran wilayah (*catchment area*) untuk revisi buku materi pokok IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota pada tahun 2011 dan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku:

Bungin, Burhan (Ed.). (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah ragam Varian Kontemporer*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches-Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (terj). Jakarta: KIK

Diamar, Son. "Pembentukan Daerah Otonom: Beberapa Catatan" Makalah. DIA-Pasca UI, 2006

Maksum Irfan. (2007) "Pilihan Strategis Model-Model Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan Daerah" Makalah tidak dipublikasikan. DIA-Program Pasca UI.

Moleong, Lexi J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Neuman, W. Laurent. (2006). *Social Research Methods-Qualitative and Quantitative Approaches*. Sixth Edition. Boston: Pearson Education.

Pusat Kajian Pemerintahan-STPDN Depdagri (2003). *Laporan Penelitian Penataan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Kota Depok*. Sumedang: Pusat Kajian Pemerintahan-STPDN Depdagri

### Sumber Internet:

"Akhir Tahun Ini Depok Punya 11 Kecamatan, 14 Juli 2009,  
<http://megapolitan.kompas.com/read/2009/07/14/18150313/> (1 Februari 2010)

"DPRD Dukung pemekaran Depok menjadi 11 Kecamatan," 11 Maret 2007  
<http://www.antaranews.com/view/?i=1173598644&c=NAS&s=> (16 Februari 2010)

"Depok Dimekarkan Menjadi 11 Kecamatan", 2 November 2009,  
<http://news.okezone.com/read/2009/11/02/338/271270/depok-dimekarkan-menjadi-11-kecamatan>, (22 Oktober 2010)

"Demografi" pada <http://www.depok.go.id/profil-kota/demografi> (2 Februari 2010)

"2 Tahun Tak Berkembang, Daerah Pemekaran Harus Digabung", 18 Juni 2009,  
<http://regional.kompas.com/read/2009/06/18/14153989/2> (19 Januari 2010)

"Daerah Pemekaran Tidak Maksimal", 21 April 2009, <http://regional.kompas.com/read/2009/04/21/13161355/> (19 Januari 2010)

"DPR Diminta Setujui Moratorium Penghentian Pemekaran Daerah",  
<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/02/24/brk,20100224-228263,id.html>  
(24 Februari 2010)

"Kota Depok", [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Depok#](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok#) (21 Oktober 2010)

panser\_garis\_keras (2008). "Sejarah Kota Depok" pada (<http://panser.withboards.com/t182-sejarah-kota-depok>, (12 Januari 2011)

"Pemekaran Melawan Efisiensi", 26 April 2010, <http://regionalkompas.com/read/2010/04/26/03583282>, (19 Oktober 2010)

Wahyudi dan Berindra dalam "Menata Ulang Pemekaran Daerah" pada <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/01/11>, Kompas 7 Januari 2010, diunduh 10 Oktober 2010 pk.11.37 WIB).

"Wali Kota Depok Desak Menpan Tambah PNS", 14 Juli 2009,  
<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/09/07/14/62173-wali-kota-depok-desak-menpan-tambah-pns> (12 Januari 2010)

"Wali: Pemekaran Berdampak Positif", pada <http://www.depok.go.id/> (19 Oktober 2010)

### **Lampiran**

Lampiran Realisasi Penerimaan PBB Bulan Nopember Kecamatan Tapos Kota Depok, 2010

## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

- a) Nama : Florentina Ratih Wulandari, S.Sos, M.Si
- b) Alamat
  - 1) Alamat Kantor: FISIP Universitas Terbuka, Jl Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15417.
  - 2) Alamat Rumah: Griya Bhara Wira Blok B RT.006 RW. 010 Sukamaju Baru, Cimanggis, Depok 16455.
- c) Telepon
  - 1) Telepon Kantor : (021) 7490941 pes. 1928
  - 2) Faksimili : (021) 7434391
  - 3) Telepon Rumah : (021) 99981331
  - 4) e-mail : [rwulan@ut.ac.id](mailto:rwulan@ut.ac.id)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a) Tahun 1977 : Lulus TK Tarakanita I, Jalan Barito, Jakarta Selatan.
- b) Tahun 1984 : Lulus SD Tarakanita I, Jalan Barito, Jakarta Selatan.
- c) Tahun 1987 : Lulus SMP Tarakanita V, Jalan Barito, Jakarta Selatan.
- d) Tahun 1990 : Lulus SMA Tarakanita I, Jalan Puloraya, Jakarta Selatan.
- e) Tahun 1996 : Lulus Strata-1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.
- f) Tahun 2008 : Lulus Strata-2 Administrasi Publik, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.

### C. RIWAYAT PEKERJAAN:

- a) Tahun 1996 - Tahun 1997 : Staf Keuangan dan Administrasi PT. Recmasindo General Trading.
- b) Tahun 1997 : Staf Marketing Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta

- c) Tahun 1998 - Sekarang : Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Pondok Cabe.

#### **D. RIWAYAT JABATAN**

- a) Tahun 2002 – Tahun 2004 : Ketua Program Studi D2/D4 Kearsipan, Jurusan Ilmu Administrasi, , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Pondok Cabe
- b) Tahun 2005- Tahun 2006 : Ketua Koordinator Persiapan Pembukaan D4 Kearsipan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Pondok Cabe

#### **E. PENELITIAN**

- a) Penelitian Mula “Efektivitas Orientasi Kerja Internal (OKI) Staf Pengajar Angkatan Tahun 2001 Pada Universitas Terbuka” , tahun 2001, dibiayai Lembaga Penelitian-Universitas Terbuka, Pondok Cabe
- b) Penelitian Mula “Pola Komunikasi Penyelesaian Tugas Bidang Pengajaran Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka”, tahun 2002, dibiayai Lembaga Penelitian-Universitas Terbuka, Pondok Cabe
- c) Penelitian Mula “Kualitas Pelayanan KTP pada Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur”, tahun 2003, dibiayai Lembaga Penelitian-Universitas Terbuka, Pondok Cabe
- d) Studi Kelayakan D2/D4 Kearsipan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Pondok Cabe, (dibiayai FISIP Universitas Terbuka, Pondok Cabe), tahun 2004-tahun 2005.
- e) Penelitian “Reformasi Layanan Publik PT. PLN (Kasus PT.PLN Area Ciracas) Jakarta Timur”, tahun 2008 (thesis, tidak dipublikasikan)
- f) Penelitian Kajian Bahan Ajar ADPU4442 “Peranan Sistem Informasi Manajemen Dalam Penciptaan Keunggulan Kompetitif Dan Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik (Studi Kasus Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan)”, tahun 2009.

#### **A. DATA PRIBADI**

- a) Nama : Ratna Nurhayati, SH, M.Hum
- b) Alamat :
  - 1) Alamat Kantor: FISIP Universitas Terbuka, Jl Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15417.
  - 2) Alamat Rumah: Griya Aviva B9, Jl Pipit Kompas, Kampung Sawah, Ciputat 15413.
- c) Telepon
  - 1) Telepon Kantor : 7490941 pes. 1908
  - 2) Faksimili : (021) 7434391
  - 3) Telepon Rumah : (021) 7445166
  - 4) e-mail : [anna@ut.ac.id](mailto:anna@ut.ac.id)

#### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- a) Tahun 1981 : Lulus SD PPSP IKIP Semarang.
- b) Tahun 1984 : Lulus SMP PPSP IKIP Semarang.
- c) Tahun 1987 : Lulus SMA Sedes Sapientiae Semarang.
- d) Tahun 1992 : Lulus Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- e) Tahun 2001 : Lulus Strata-2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.

#### **C. RIWAYAT PEKERJAAN:**

- a) Tahun 1992 - Tahun 1997 : Sekretaris Board of Director BSG Group.
- b) Tahun 1998 - Sekarang : Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Pondok Cabe.

#### **D. RIWAYAT JABATAN**

- a) Tahun 2008 – Tahun 2011 : Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Pondok Cabe

## E. PENELITIAN

- a) “Evaluasi Bahan Ajar jarak jauh Hukum Tata Pemerintahan (IPEM4321)”, tahun 2006, dibiayai FISIP Universitas Terbuka, Pondok Cabe.
- b) “Kajian Hak Cipta Bahan Ajar Multimedia Universitas Terbuka (Studi Kasus bahan ajar multimedia di FISIP-UT)”, tahun 2006, dibiayai Lembaga Penelitian-Universitas Terbuka, Pondok Cabe.
- c) “*Tracer Study* Program Studi Ilmu Administrasi Negara”, tahun 2007, dibiayai FISIP Universitas Terbuka, Pondok Cabe.
- d) “Koordinasi dan efektifitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Urusan Pendidikan di Kabupaten Cianjur”, tahun 2008, dibiayai Lembaga Penelitian-Universitas Terbuka, Pondok Cabe.
- e) Studi Kelayakan S1-Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Pondok Cabe, tahun 2004-tahun 2005, dibiayai FISIP Universitas Terbuka, Pondok Cabe.

## A. DATA PRIBADI

- d) Nama : Hasmonel, SH, M.Hum
- e) Alamat :
  - 1) Alamat Kantor: Gedung Rektorat UT, Lt III, Jl Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15417
  - 2) Alamat Rumah: **Perumahan Vila Inti Persada Blok D2 No 4 Pamulang, Tangerang 15418.**
- f) Telepon
  - 1) Telepon Kantor : 7490941 pes. 1115
  - 2) Faksimili : (021) 7434391
  - 3) Telepon Rumah : (021) 74717540
  - 4) e-mail : [anna@ut.ac.id](mailto:anna@ut.ac.id)

## B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a) Tahun 1973 : Lulus SD.
- b) Tahun 1976 : Lulus SMP.



- c) Tahun 1980 : Lulus SMA.
- d) Tahun 1986 : Lulus Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- e) Tahun 1997 : Lulus Strata-2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

### C. RIWAYAT PEKERJAAN:

No	Pangkat dan Golongan	Tahun	Jabatan/Tugas Tambahan
1	CPNS. III/a	1988	Tenaga Pengajar
2	Penata Muda, III/a	1989	Asisten Ahli Madya
3	Penata Muda TKI, III/b	1991	Asisten Ahli
4	Penata, III/c	1993	Lektor Muda, Koord Registrasi UPBJJ-UT Bkl
5	Penata TK I, III/d	1999	Lektor Madya/ Ketua PS. DIII
6	Penata TK I, III/d	2001	
7	Pembina, IV/a	2003	Perpajakan
8	Pembina Tk I, IVb	2010	Lektor/Asisten PurekIV
			Lektor Kepala/Pembantu Rektor III
			Lektor Kepala/Pembantu Rektor III

### D. RIWAYAT JABATAN

- b) Tahun 2008 – Tahun 2011 : Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Pondok Cabe

### E. PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH

1. Status Kepemilikan Tanah Dikaitkan dengan Perjanjian Bagi Hasil Di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat (1997)
2. Status Kepemilikan Tanah Dikaitkan dengan Perjanjian Bagi Hasil (Dalam Majalah Ilmiah UNHAZ (1997)
3. Laporan Penelitian tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Dataran Tinggi Pasmah (1997)

4. Ketahanan Nasional Dikaitkan dengan Penerapan Hukum (Dalam Majalah Komunika (1998)
5. Laporan Penelitian Faktor-faktor Dominan Terjadinya Perambahan Hutan di Kabupaten Rejang Lebong dan Upaya Penanggulangannya (1998)
6. Laporan Penelitian Reklamasi Pantai Dalam Hubungannya dengan Pendaftaran Tanah (2000).
7. Laporan Penelitian Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (Studi Eksplorasi di Perumahan Karyawan UT di Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Bogor (2000)
8. Pemilikan Tanah Absentee Di Kabupaten Lahat (Dalam Jurnal Studi Indonesia UT (2001)
9. Reklamasi Pantai Dalam Hubungannya dengan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Pantai Utara Jakarta) Dalam Jurnal Studi Indonesia (2002)
10. Gugat Cerai Istri Terhadap Suami (Studi Kasus di Jakarta Selatan, 2005)

## Lampiran Transkrip Wawancara

Cuplikan wawancara dengan Prof. DR. Irfan Maksu pada hari Rabu, September 2010, pkl.14.00 WIB – 16.00 WIB:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang melatarbelakangi dilakukannya pemekaran wilayah?	"Daerah perlu pemekaran karena ada beberapa alasan, pertama pengembangan wilayah, pembangunan, demokrasi. semakin mekar, semakin besar kota kecamatan, semakin besar akses masyarakat mengawasi aparatur pemerintahan; semakin mekar ibukota kecamatan yang ada sebagai pusat pemerintahan maka layanan pemerintah semakin mendekati masyarakat. Layanan yang diberikan bersifat teritorial yang menyangkut kependudukan; tapi... harus dilihat juga apakah pemekaran itu juga diikuti pula pembangunan layanan sektoral, misalnya puskesmas?..."
2	Bagaimana dengan pemekaran kecamatan di wilayah Kota Depok?	"Depok kan semakin berkembang, banyak penduduknya, perkembangannya pesat...nah kalau ditanya seberapa perlu pemekaran kecamatan di Kota Depok, jelas perlu ! ( <i>nadanya tegas</i> ) sebab penduduk Depok naik 5%, katakanlah sekarang 1 juta lebih; pada awal 6 (kecamatan) jadi 11 (kecamatan), 11 itu untuk sekitar 1 juta orang, jadi 1 kecamatan rata-rata (melayani) 100.000 penduduk. Jika dilihat dari <i>catchment area</i> , maka kapasitas rendah; dari 6 kecamatan sehingga perlu 11 kecamatan. Nah, 11 kecamatan, optimal sudah apa belum perlu diteliti..."
	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran wilayah? (demografi, ekonomi, sosial, wilayah, politik)?	" faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran wilayah harus mengacu pada pertimbangan ( <i>based on</i> ) <i>teritory</i> sendiri apakah cukup dilakukannya pemekaran, harus didorong oleh adanya tuntutan pemekaran wilayah ( <i>teritory</i> ) antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah, yang keduanya menyangkut perkembangan penduduk. Selain itu efektivitas layanan perlu dipertimbangkan kembali dan desain organisasi harus dikaitkan dengan sektoral: apakah betul layanan di kecamatan menyangkut kebutuhan penduduk atau tidak?... Jadi kalau bisa dilayani dengan layanan yang bersifat sektoral atau jika yang dibutuhkan layanan sektoral, maka daerah kecamatan tidak harus dimekarkan. Nah....boleh tidaknya kecamatan dimekarkan misalnya untuk memudahkan layanan informasi penduduk dan koordinasi dengan kelurahan. Tapi kalau untuk urusan layanan kebersihan dan kesehatan, maka tidak perlu (kecamatan) dimekarkan. "
3	Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pemekaran kecamatan-kecamatan?	"...karena pemerintahan Kota Depok sudah jalan, harus ada desain organisasi Pemda yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah, khususnya pada bidang ekonomi dan layanan publik. Organisasi Pemda terdiri dari sektoral dan teritorial, dimana teritorial ini <i>based on</i> <i>teritory</i> pada kecamatan sampai kelurahan untuk mendekatkan layanan."
4	Apa saja masalah dan potensi masalah mempengaruhi pemekaran	" Perlu diketahui pula Camat itu alatnya Bupati atau walikota; daerah atasannya otonom, jadi kecamatan merupakan alatnya daerah otonom, anggarannya dalam rangka (daerah) atasannya otonom dan akuntabel jadi harus bertanggungjawab kepada (daerah) atasannya...pertimbangan ( <i>based on</i> ) <i>teritory</i> sendiri

No.	Pertanyaan	Jawaban
	kecamatan-kecamatan di Kota Depok dari sudut pandang akademisi	apakah cukup dilakukannya pemekaran, harus di didorong oleh adanya tuntutan pemekaran wilayah ( <i>teritory</i> ) antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah, yang keduanya menyangkut perkembangan penduduk. Selain itu efektivitas layanan perlu dipertimbangkan kembali dan desain organsiasi harus dikaitkan dengan sektoral: apakah betul layanan di kecamatan menyangkut kebutuhan penduduk atau tidak?. Jadi kalau bisa dilayani dengan layanan yang bersifat sektoral atau jika yang dibutuhkan layanan sektoral, maka daerah kecamatan tidak harus dimekarkan. Nah....boleh tidaknya kecamatan dimekarkan misalnya untuk memudahkan layanan informasi penduduk dan koordinasi dengan kelurahan. Tapi kalau untuk urusan layanan kebersihan dan kesehatan, maka tidak perlu (kecamatan) dimekarkan. "....faktor internalnya bersifat rasional, mencakup jumlah penduduk dan luas wilayah... faktor eksternalnya, <i>irrational</i> , menyangkut faktor politik dan birokrasi yang <i>vis a vis</i> masyarakat, dimana politisi lokal mendambakan pemekaran, birokrasi dapat semakin membengkak, bagi-bagi jatah <i>resources</i> yang tidak rasional, bisa terjadi..."
5	Referensi yang dapat digunakan	Buku-buku saya...bisa lihat tesis saya Mbak dan referensi di dalamnya, coba kaji lagi, termasuk buku-buku dari Prof Eko Prasjo.
Penutup	Terima kasih banyak atas wancaranya Prof...	Sama-sama...

Cuplikan wawancara dengan Kasie Pemerintahan Drs. Jaka Susanta, MH (wawancara pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, pkl. pkl.14.00 WIB – 16.30 WIB yakni:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang melatarbelakangi dilakukannya pemekaran kecamatan di wilayah Kota Depok?	"Pengembangan wilayah, juga ekonomi, tadinya perputaran ekonomi ke ke Cibinong, Kramat Jati dan Cileungsi ke di harapkan dengan adanya pasar tradisional – modern (yang akan dibangun), perputaran bisa di daerah ini sendiri."
2	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran kecamatan di wilayah Kota Depok? (demografi, ekonomi, sosial, wilayah, politik)?	"faktor pertama, pemerataan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam pemekaran kecamatan Tapos...bisa terlihat dalam waktu dekat ini. Terminal Jatijajar sekelas Pulogadung dan Kampung Rambutan, yang bisa antarkota antarprovinsi, Terminal Jatijajar ini juga kan ditingkatkan infrastrukturnya, yang tadinya kurang lebih 4 meteran dilebarkan atau ditingkatkan jadi 42 meter. Terminal Jatijajar ini sudah menjadi magnet tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan lapangan kerja yang tadinya terbatas jadi luas...Rumah pemotongan Hewan diusulkan kepada Walikota...Pasar tradisional modern...apa itu,...yah istilahnya yang tradisional tapi modern- <i>lah</i> penataannya, yang gak becek, sudah dilakukan kajian oleh konsultan, lokasi yang tepat, yang kita identifikasikan sebagai lokasi yang tepat. Jadi factor pemerataan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam pemekaran kecamatan Tapos, nah bisa terlihat dalam waktu dekat ini. Terminal Jatijajar sekelas

No.	Pertanyaan	Jawaban
		Pulogadung dan Kampung Rambutan, yang bisa antarkota antarprovinsi, Terminal Jatijajar ini juga kan ditingkatkan infrastrukturnya, yang tadinya kurang lebih 4 meteran dilebarkan atau ditingkatkan jadi 42 meter. Terminal Jatijajar ini sudah menjadi magnet tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan lapangan kerja yang tadinya terbatas jadi luas. Pengangguran diharapkan dapat diminimalisasi. Rumah pemotongan Hewan diusulkan kepada Walikota. Untuk meningkatkan lagi maka mau dibangun Pasar tradisional modern...apa itu,...yah istilahnya yang tradisional tapi modern- <i>lah</i> penataannya, yang gak becek, sudah dilakukan kajian oleh konsultan, lokasi yang tepat, yang kita identifikasikan sebagai lokasi yang tepat.makanya infrastruktur jalan lagi dikembangkan nih, coba Ibu lihat di dekat sini (sambil menunjuk ke arah luar) adanya pembukaan pintu tol Jagorawi lagi...dekat wilayah Kecamatan Tapos, yakni tol Cijago melintas di wilayah kita juga, otomatis mobilitas penduduk lebih dinamis lagi, ekonomi jadi lebih semarak lagi, potensi berkembangnya sangat besar."
3	Apa saja kendala yang dihadapi sebagai kecamatan hasil pemekaran yang baru	"kendala kita ya di sarana, sementara ini, kantor kecamatan ( Kecamatan Tapos) masih sewa, masih pakai layanan di gedung kelurahan Tapos, sementara kantor kita masih dalam (rencana) pembangunan, sekarang kan kita juga sudah di depan jalan raya, gampang nyarinya, masyarakat juga tahu, jadi gak repot karena dekat dengan jalan. Kendala kedua yah sementara, komputer kita sudah ada 3 (tiga) komputer untuk 3 (tiga) Seksi, nah kita untuk mengatasinya pakai laptop, ketiga kendala jumlah personil, (struktur) kita kebetulan ada Camat, Setcam untuk (urusan) rumah tangga (internal Kecamatan Tapos) dan 3 Kepala Seksi, pada Seksi Tramtib, Seksi Ekbang dan Seksi Pemerintahan, dengan jumlah personil yang terbatas, ya sebetulnya kurang, tapi kita solid...kita (antarseksi) saling memahami-lah tugas satu sama lain dan mengerjakan tugas bersama-sama, saling mengisi-lah, sedikit tapi lebih solid, tapi ya kita belum nemuin sih masalah-masalah administrasi kependudukan di tingkat aparat dengan berubahnya dari Kecamatan Cimanggis ke Kecamatan Tapos, tapi mungkin kalau di masyarakat, mungkin ada (masalah), sebab ada perubahan nama kecamatan dari Cimanggis ke Tapos, gitu aja, jadi teknis-lah tidak terlalu strategis masalahnya."
4	Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?	"Nah kita mengatasinya untuk keterbatasan komputer tadi, kita mengatasinya dengan menggunakan <i>laptop</i> pribadi, kan sekarang sudah umum, kedua untuk personil, karena orangnya terbatas (jumlahnya), kita ada bikin ruang pelayanan tanggung jawab bersama masing-masing (para) Kasie, ada SOP-nya."

## **Pedoman Wawancara Mendalam**

### **A. Pakar**

1. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya pemekaran wilayah?
2. Bagaimana dengan pemekaran kecamatan di wilayah Kota Depok?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran wilayah? (demografi, ekonomi, sosial, wilayah, politik)?
4. Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pemekaran kecamatan-kecamatan?
5. Apa saja masalah dan potensi masalah mempengaruhi pemekaran kecamatan-kecamatan di Kota Depok dari sudut pandang akademisi?
6. Referensi yang dapat digunakan?

### **B. Informan (Bagi Narasumber Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Depok dan Kecamatan Tapos)**

1. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya pemekaran kecamatan di wilayah Kota Depok?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran kecamatan di wilayah Kota Depok? (demografi, ekonomi, sosial, wilayah, politik)?
3. Apa saja kendala yang dihadapi sebagai kecamatan hasil pemekaran yang baru?
4. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

## Lampiran Tabel

Tabel I. Potensi Calon Kecamatan Cimanggis (Induk) dan Calon Kecamatan Tapos (Pemecahan)

No.	Variabel	Skor Standar	Skor calon Kecamatan Cimanggis	%	Skor calon Kecamatan Tapos	%
1.	Demografi	128	121,60	95,00	119,00	92,97
2.	Orbitrasi	16	13,60	85,00	9,25	57,81
3.	Pendidikan	360	294,00	81,67	322,40	89,58
4.	Kesehatan	240	222,00	92,50	217,50	90,63
5.	Transportasi	56	46,20	82,50	43,75	78,13
6.	Komunikasi	112	100,80	90,00	98,88	88,28
7.	Perekonomian	240	202,00	84,17	192,50	80,21
8.	Sosial budaya	80	57,00	71,25	66,25	82,81
9.	Pertanian	64	48,00	75,00	51,00	70,69
10.	Peternakan	16	12,00	75	13,50	84,38
11.	Sosial Politik	48	40,00	85,00	40,00	83,33
12.	Partispasi Masyarakat	160	174,00	108,75	160,00	100,00
13.	Sosial Kemasyarakatan	16	14,80	92,50	15,00	93,75
14.	Kamtibmas	32	24,80	77,50	26,50	82,81
15.	Ketenagakerjaan	36	31,80	88,33	33,00	91,67
	Jumlah	1.604	1.403	85,61	1.409	85,07

Sumber : Pusat Kajian Pemerintahan-STPDN Depdagri (2003). Laporan Penelitian Penataan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Kota Depok, hal. 61

Tabel II. Disain Strategi Potensi Pada Kecamatan Tapos

No.	Variabel	Skor di bawah rata-rata	Pilihan tindakan
1.	Orbitrasi	$100 - 57,81 = 42,19$	Relokasi pusat pemerintahan, pelayanan dan ekonomi masyarakat serta meningkatkan sarana transportasi dan komunikasi
2.	Transportasi	$100 - 78,13 = 21,87$	Pembangunan jalan dan penyediaan sarana transportasi yang mencukupi bagi masyarakat dan kemudahan kepemilikan kendaraan sendiri untuk menunjang kegiatan perekonomian dan untuk kelancaran aktivitas rutin
3.	Pertanian	$100 - 79,69 = 20,31$	Pemanfaatan lahan untuk sarana pertanian yang meliputi persawahan, palawija, sayuran maupun buah-buahan serta kemungkinan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian tanaman pangan
4.	Perekonomian	$100 - 80,21 = 19,79$	Fasilitasi pembentukan dan peningkatan peran lembaga keuangan, koperasi, pasar, warung dan pertokoan, serta pembangunan sarana rekreasi seperti penyediaan tempat penginapan dan tempat hiburan untuk menarik minat pendatang
5.	Kamtibmas	$100 - 82,81 = 17,19$	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban untuk meminimalisir gangguan kamtibmas melalui penyediaan sarana keamanan seperti pos jaga, kelengkapan ronda dan penyediaan personil yang memadai serta kerjasama dengan unit keamanan terkait seperti polisi, hansip dan linmas
6.	Sosial budaya	$100 - 82,81 = 17,19$	pembangunan sarana ibadah yang emmadai bagi masyarakat seperti masjid, surau/langgar, gereja, pura dan vihara dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dan mendekatkan diri kepada

No.	Variabel	Skor di bawah rata-rata	Pilihan tindakan
			Tuhan tang Maha esa, penyediaan sarana sosial seperti panti, penyediaan fasilitas olah raga dan sarana kesenian
7	Sosial Politik	$100 - 83,33 = 16,67$	Pendidikan dan sosialisasi politik untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, pemberdayaan ormas dan pemberdayaan partai ppolitik dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan
8	Peternakan	$100 - 84,38 = 15,62$	Mendorong pertumb uhan sektor peternakan melalui bantuan modal dan bantuan teknis baik untuk peternakan besar, sedang maupun unggas

Sumber : Pusat Kajian Pemerintahan-STPDN Depdagri (2003). Laporan Penelitian Penataan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Kota Depok, hal. 65-66





**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KOTA DEPOK**

Jln. Pemuda No. 70 B Pancoran Mas - Depok 16431

Telp./Fax. (021) 77204704

**SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN**

Nomor. 070 / -Kesbang Pol & Linmas

Membaca : Surat dari: Ketua LPPM Universitas Terbuka, tanggal 26 Agustus 2010, Nomor: 15016/H31.2/PG/2010, tentang permohonan izin penelitian

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, tentang : Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  
2. Peraturan Walikota Depok Nomor 42 tahun 2008, tentang : Rincian tugas fungsi dan tata kerja Kantor Kesbang Pol & Linmas (Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat)

Mengingat : Kegiatan yang bersangkutan tersebut diatas maka;

Dengan ini kami tidak keberatan **dilakukannya penelitian** oleh :

Nama : 1. FR.Wulandari,S.IP, M.Si,  
2. Ratna Nurhayati, SH. M.Hum,  
3. Hasmonel, SH. M.Hum

Npm : -

Jurusan : Ilmu Administrasi/FISIP

Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran kecamatan di Kota Depok

Lama : 28 Oktober s/d 28 Januari 2011

Tempat : • Bagian Humas & Protokol Setda Kota Depok,  
• Kecamatan Se-Kota Depok.

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Sebelum melakukan kegiatan PKL/ magang/ , riset/pengumpulan data/ observasi/ serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ universitas, yang bersangkutan harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala : Dinas/ Badan/ Lembaga/ Kantor/ Bagian yang dituju, dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/ topik masalah/ tujuan akademik;
3. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan kegiatan dimaksud belum selesai, perpanjangan izin kegiatan harus diajukan oleh instansi pemohon;
4. Sesudah selesai melakukan kegiatan , yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya kepada Walikota Depok, Up. Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas - Kota Depok;
5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Depok, 28 Oktober 2010

**An. KEPALA KANTOR KESBANG POL & LINMAS**

Kasubag Tata Usaha

**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth,

1. Walikota Depok (sebagai laporan),
2. Ka.Bagian Humas & Protokol Setda Kota Depok,
3. Camat Se-Kota Depok,
4. Ketua LPPM Universitas Terbuka,
5. Ybs.

**DEDI KUSMANA, S.IP**

NIP: 1957 0816198402 1002

Realisasi Penerimaan PBB

Bulan : Nopember

Minggu : Tanggal 29-10-2010 s/d 04-11-2010

Kecamatan Tapos Kota Depok

PBB Tahun 2010

No	Kelurahan	TARGET		REALISASI PENERIMAAN PBB		JUMLAH REALISASI		SISA		%
		STTS	Uang (RP)	STTS	Uang (RP)	STTS	Uang (RP)	STTS	Uang (RP)	
1	Cilangkap	12,870	903,753,561	7,713	557,975,762	70	3,403,558	5,087	342,374,241	62.12%
2	Cimpaeun	6,835	585,515,868	2,957	241,416,521	27	1,663,110	3,851	342,436,237	41.52%
3	Tapos	5,789	740,569,550	2,859	323,673,675	32	2,975,629	2,898	413,920,246	44.11%
4	Leuwinanggung	6,420	872,139,015	2,769	331,579,916	48	4,474,014	3,603	536,085,085	38.53%
5	Jatijajar	8,677	735,115,217	4,786	362,552,831	59	4,338,018	3,832	368,224,368	49.91%
6	Sukamaju Baru	8,931	736,715,970	5,188	634,526,772	78	2,145,780	3,665	100,043,418	86.42%
7	Sukatani	15,630	1,606,666,212	8,974	777,930,021	60	830,356	6,596	827,905,835	48.47%
	Jumlah	65,152	6,180,475,393	35,246	3,229,655,498	374	19,830,465	29,532	2,930,989,430	52.58%

sesuai hasil laporan mingguan penerimaan PBB dari Bank Jabar Banten.

Tapos, Nopember 2010  
CAMAT TAPOS,

Drs. TAUFAN ABDUL FATAH, MH  
PEMBINA  
NIP. 196007241992031003